KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

REVIU KEBIJAKAN MANDIRI

AKSESI INDONESIA KE OECD:

REVIU STRATEGIS GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, DAN IMPLIKASINYA

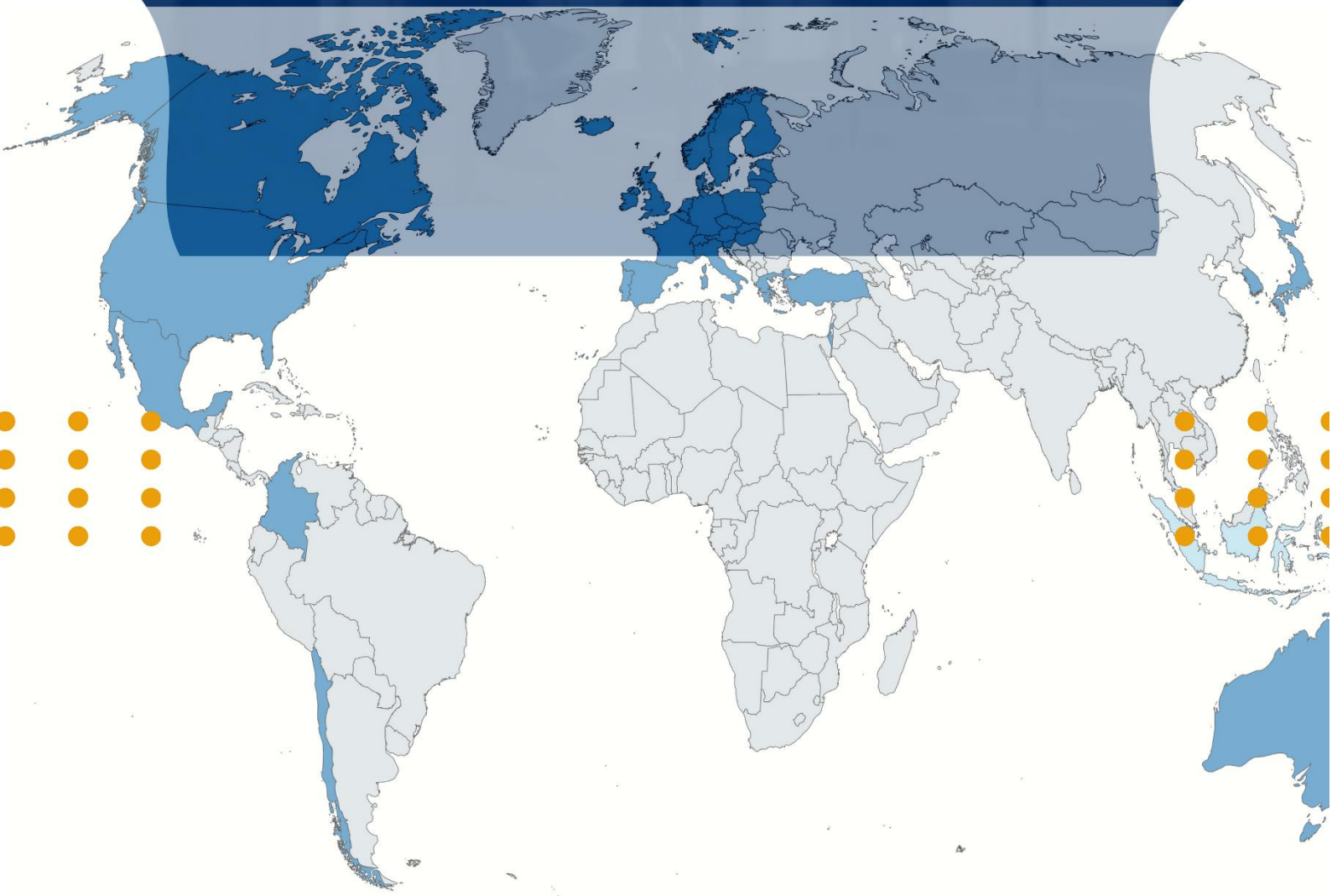

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN MULTILATERAL
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
2023

POLICY REVIEW

(Reviu Kebijakan Mandiri)

Aksesi Indonesia ke OECD:

Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya

AKSESI INDONESIA KE OECD:

REVIU STRATEGIS GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, DAN IMPLIKASINYA

Diterbitkan oleh
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Jl. Taman Pejambon No. 6
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 384 9810 ext. 7709
Faks. (021) 386 1385
Surel: ppk_oi@kemlu.go.id

ISBN: -

Hak Cipta 2023 pada Pemerintah Republik Indonesia

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pengarah dan Penanggung Jawab

Dr. Yayan G. H. Mulyana | Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

Penyunting

Rio Budi Rahmanto, Ph.D. | Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, BSKLN

Tim Penyusun | Pusat Strategi Kebijakan Multilateral

Leonard Felix Hutabarat | Lucky Nugraha | Maulana Syahid | Adi Kuntarto | Yustia Rahma Priyantari | Handayani Lintang Purwaning Ayu | Gede Resnadiasa | Galuh Octania Permatasari | Naldo Helmys

KATA PENGANTAR KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju pada 100 tahun usia kemerdekaan dirumuskan ke dalam Visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut telah menjadi "*a new context for Indonesia's diplomacy and foreign policy.*"

Dalam konteks tersebut, peran Pemerintah RI pada kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional perlu ditingkatkan, salah satunya dengan menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) melalui proses aksesi.

Aksesi Indonesia ke OECD didorong oleh sejumlah faktor strategis. Pertama, kemitraan Indonesia-OECD sudah terbilang erat. Sejak tahun 2007 Indonesia telah menjadi *key partner* pada OECD serta menjalin berbagai kerja sama melalui *Joint Work Programme* (JWP) secara berjangka. JWP 2022-2025 membantu pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025. Sementara keanggotaan Indonesia ke depan diharapkan dapat membantu pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Kedua, modalitas Indonesia cukup kuat, terlihat dari kepemimpinan internasional (G20 dan ASEAN), masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas dengan *gross national income* (GNI) per kapita mencapai 4.580 pada 2022, serta berada di posisi kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia. Pada tahun 2030 diproyeksikan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7, lalu ke-5 pada tahun 2045. Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2045 ditargetkan mencapai IDR 320 juta per tahun atau IDR 27 juta per bulan, *gross domestic poduct* (GDP) mencapai USD 7 triliun, serta mampu mengatasi kemiskinan hingga mendekati nol persen.

Target tersebut dapat dicapai dengan melakukan berbagai perbaikan kebijakan di tingkat domestik. Untuk itulah Indonesia perlu menjadi anggota OECD agar dapat melakukan perubahan dengan standar-standar berkualitas tinggi sebagaimana diterapkan di negara-negara maju.

Apabila Indonesia bergabung dengan OECD, manfaatnya harus dirasakan kedua pihak. Jika dilihat megatren ke depan, pada tahun 2045 penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,45 miliar. Akan ada sekitar 8,1 miliar kelas menengah pada 2050, yang terkonsentrasi di Asia dan Amerika Latin. OECD tengah meluaskan jangkauan global ke Amerika Latin dengan turut bergabungnya Kolombia dan Kosta Rika, lalu dibukanya proses aksesi untuk Argentina, Brazil, dan Peru. Sementara Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea Selatan jika diterima menjadi anggota OECD.

Selain itu dukungan publik domestik dibutuhkan untuk menyukseskan segala proses aksesi Indonesia ke OECD. Sehingga, Reviu Kebijakan Mandiri (RKM) ***Aksesi Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya*** ini kami hadirkan tidak saja

sebagai *preliminary research* untuk meninjau kesiapan Indonesia bergabung dengan OECD, tetapi juga sebagai informasi kepada publik serta menjadi dasar dalam penyusunan narasi publik mengenai manfaat bergabung dengan OECD. Saya berharap RKM ini dapat digunakan oleh berbagai *stakeholder* yang akan terlibat dalam persiapan aksesi Indonesia ke OECD serta dapat memperkaya pemahaman masyarakat akan urgensi perlunya OECD sebagai katalis untuk mencapai Indonesia Maju.

Jakarta, 31 Oktober 2023

Yayan Ganda Hayat Mulyana
Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN MULTILATERAL

Reviu Kebijakan Mandiri (RKM) **"Aksesi Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya"** ini disusun dengan maksud untuk memberikan suatu kajian awal guna mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD.

RKM ini memuat informasi, analisis, serta tinjauan antara lain profil OECD dan perluasan keanggotaannya, proses dan kriteria aksesi ke OECD, pelajaran dan praktik terbaik dari Kosta Rika, Kolombia, dan Lithuania (negara anggota OECD) serta Argentina dan Brazil (negara kandidat OECD), serta analisis kebijakan strategis aksesi Indonesia ke OECD.

Aksesi ke OECD merupakan proses yang kompleks dan memakan waktu karena harus menyelaraskan berbagai peraturan nasional agar sesuai dengan standar OECD. Negara kandidat OECD akan dinilai oleh berbagai komite mulai dari yang terkait dengan investasi, anti-suap, tata kelola perusahaan, keuangan, asuransi dan pensiun, kompetisi, fiskal, lingkungan, teknologi kimia dan bioteknologi, tata kelola publik, anggaran, regulasi, pengembangan kawasan, statistik, pembangunan ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi digital, hingga kebijakan konsumen.

Dengan kompleksitas tersebut kementerian atau lembaga (K/L) terutama yang terkait dengan sektor-sektor komite OECD perlu memiliki pemahaman bersama mengenai detail dan nilai strategis proses aksesi. Pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* tentunya diperlukan terlebih proses aksesi tidak saja melibatkan unsur pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, universitas dan *think tank*, BUMN, serta unsur non-pemerintah seperti swasta, lembaga sosial masyarakat, hingga generasi muda. Pandangan strategis yang holistik inilah yang coba dihadirkan melalui RKM ini.

Penyusunan RKM ini juga didorong oleh perlunya tinjauan terhadap aspek geopolitik dan geoekonomi aksesi serta implikasinya. Sudah menjadi keharusan bahwa politik dan hubungan luar negeri Indonesia mesti diukur apakah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sejauh mana pula aksesi ke OECD akan mempengaruhi dinamika politik luar negeri Indonesia khususnya pada tingkat global di forum multilateral di mana kepentingan negara maju dan kepentingan negara berkembang bertemu. Relevansi tinjauan aspek geopolitik dan geoekonomi menjadi kian penting agar aksesi ke OECD tidak saja untuk melakukan pembaharuan domestik bagi Indonesia, tetapi juga dapat dipertimbangkan peran apa yang dapat diambil Indonesia di antara negara-negara maju.

Terakhir, kami berharap RKM ini dapat bermanfaat bagi segenap *stakeholder* yang terlibat langsung dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan aksesi Indonesia ke OECD.

Hasil kajian ini juga dapat menjadi bahan bagi para akademisi terutama terkait isu organisasi internasional atau pembangunan internasional.

Jakarta, 31 Oktober 2023

Rio Budi Rahmanto
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri

RINGKASAN EKSEKUTIF

Upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) melalui proses aksesi didorong oleh motivasi untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 dunia pada tahun 2045.

OECD dibentuk pada tahun 1961 dan saat ini memiliki 38 negara anggota. Untuk bergabung dengan OECD, negara kandidat harus memenuhi kriteria yang terdapat pada *Framework for the Consideration of Prospective Members*. Negara kandidat harus melalui tahapan pra-aksesi, aksesi, dan pasca-aksesi. Proses aksesi dimulai ketika Dewan OECD memutuskan untuk membuka diskusi aksesi. Dewan OECD akan mengadopsi peta jalan aksesi untuk diimplementasikan oleh negara kandidat.

Proses implementasi ini atau sering dirujuk sebagai reformasi domestik membutuhkan waktu, 3 hingga 7 tahun apabila berkaca dari negara-negara yang relatif baru bergabung: Kosta Rika, Kolombia, dan Lithuania. Pengalaman ketiga negara, serta negara yang sedang dalam proses aksesi seperti Argentina dan Brazil, sangat berharga untuk menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk mengetahui reformasi seperti apa yang dilakukan dan bagaimana hasilnya.

Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan keanggotaan pada OECD memberikan dampak positif di berbagai bidang, meskipun tantangan kembali muncul pada saat pandemi COVID-19.

Ditinjau dari aspek geopolitik dan geoekonomi, terdapat beberapa manfaat dan implikasi apabila Indonesia menjadi anggota OECD. Indonesia masih dapat menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan memainkan peran sebagai *bridge builder*, tetapi diperkirakan perlu melakukan rekonfigurasi terbatas posisi di forum internasional. Dengan menjadi anggota OECD, Indonesia dapat mengkatalisasi reformasi domestik, meningkatkan daya tarik untuk investasi, serta berpartisipasi dalam pembentukan standar OECD.

Beberapa tantangan perlu diantisipasi, seperti masalah kontribusi, kesiapan Indonesia dalam memenuhi standar dan instrumen OECD, kesiapan negosiasi dengan komite-komite OECD, koordinasi nasional, serta isu-isu yang patut menjadi perhatian: liberalisasi perdagangan dan investasi, *anti-bribery convention*, penyederhanaan regulasi, hingga masalah lingkungan hidup.

Reviu kebijakan ini menawarkan sejumlah rekomendasi strategi kebijakan sebagai berikut:

Strategi Kebijakan di Luar Negeri

1. Indonesia secara sistematis melakukan pendekatan ke negara-negara OECD untuk mendapatkan dukungan politis.
2. Pemerintah Indonesia dapat melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan OECD.
3. Indonesia dapat menggunakan proses aksesi untuk memperoleh dukungan teknis dan finansial untuk kelancaran reformasi domestik.

4. Kementerian/Lembaga dapat mengintensifkan upaya lobi dan pembahasan teknis kepada pihak-pihak terkait di OECD, terutama komite dan kelompok kerja.
5. Memanfaatkan proses aksesi menjadi anggota OECD untuk meningkatkan kepercayaan investor asing.

Strategi Kebijakan di Dalam Negeri

1. Penyelarasan kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik.
2. Peninjauan terhadap pelaksanaan *Joint Work Programme* (JWP) 2022-2025.
3. Perlunya tinjauan aspek reformasi BUMN yang selaras dengan kepentingan nasional.
4. Pelibatan pendekatan politik dalam proses aksesi.
5. Perlunya pemahaman bersama dengan DPR RI agar proses ratifikasi berjalan lancar.

Selain itu, reviu kebijakan ini juga menawarkan narasi publik manfaat keanggotaan pada OECD yang konkret dan realistis serta dapat dinikmati masyarakat. Aksesi ke OECD dapat memberikan manfaat di bidang politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Aksesi dapat meningkatkan citra positif Indonesia di dunia, mendorong Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, dapat memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi multilateral, mendukung reformasi penegakkan hukum di dalam negeri terutama untuk pengentasan korupsi, serta melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik.

Manfaat juga dapat dirasakan dari aspek ekonomi dan pembangunan. Keanggotaan pada OECD dapat menjadi *tools* untuk meningkatkan GNI per kapita sehingga membantu Indonesia untuk keluar dari *middle-income trap* serta untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Aksesi juga dimaksudkan untuk melakukan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, pemanfaatan bonus demografi, pengurangan utang pemerintah dengan optimalisasi pendapatan dari sektor pajak, serta mempercepat reformasi tata kelola BUMN untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, aksesi juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri 1
Kata Pengantar Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral 3
Ringkasan Eksekutif 5
Daftar Isi 7
Daftar Tabel dan Grafik 9
1 PENDAHULUAN 10
1.1 Latar Belakang 10
1.2 Tujuan 10
1.3 Permasalahan 11
1.4 Metodologi 11
1.5 Struktur 13
2 PROFIL DAN PERLUASAN KEANGGOTAAN OECD 14
2.1 Profil OECD 14
2.1.1 Pendirian 14
2.1.2 Agenda dan Tujuan 14
2.1.3 Struktur Organisasi 14
2.2 Perluasan Keanggotaan OECD 15
2.2.1 Sejarah Perluasan Keanggotaan OECD 15
2.2.2 Negara Kandidat OECD 15
3 PROSES DAN KRITERIA AKSESI KE OECD 19
3.1 Proses Aksesi 19
3.1.1 Pra-Aksesi 19
3.1.2 Aksesi 20
3.1.3 Pasca-Aksesi 21
3.2 Kriteria Anggota OECD 21
3.2.1 Economic and Public Governance 21
3.2.2 Kemampuan (*ability*), Kapasitas (*capacity*), dan Pelibatan (*engagement*) 22
3.2.3 Reach and Impact 23
3.3 Kondisi Indonesia 23
3.3.1 Indonesia sebagai *Key Partner OECD* 23
3.3.2 Posisi Indonesia di OECD 24
4 PELAJARAN DAN PRAKTIK TERBAIK 26

4.1 Negara yang Relatif Baru Bergabung OECD 26
4.1.1 Kosta Rika 26
4.1.2 Kolombia 28
4.1.3 Lithuania 30
4.1.4 Data Tata Kelola Pemerintahan dan Makroekonomi 32
4.2 Negara Kandidat OECD 42
4.2.1 Argentina 42
4.2.2 Brazil 43
5 ANALISIS KEBIJAKAN STRATEGIS AKSESI INDONESIA KE OECD 45
5.1 Aspek Geopolitik dan Geoekonomi 45
5.1.1 Konsisten Menjalankan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif 45
5.1.2 Memainkan Peran *Bridge Builder* 46
5.1.3 Rekonfigurasi Terbatas Posisi Indonesia di Forum International 46
5.1.4 Katalis Reformasi Domestik 48
5.1.5 Sinyal Positif dan Meningkatkan Daya Tarik untuk Investasi 48
5.1.6 Berpartisipasi dalam Pembentukan Standar OECD 48
5.2 Antisipasi Tantangan dan Implikasi Proses Aksesi ke OECD 49
5.2.1 Kontribusi 49
5.2.2 Standar dan Instrumen OECD 49
5.2.3 Kesiapan Negosiasi dengan Komite-Komite OECD 51
5.2.4 Tinjauan Awal mengenai Modalitas dan Tantangan Implementasi Standar OECD 52
6 REKOMENDASI STRATEGI KEBIJAKAN DAN NARASI PUBLIK 56
6.1 Kesimpulan 56
6.2 Rekomendasi Strategi Kebijakan 57
6.2.1 Strategi kebijakan di luar negeri 57
6.2.2 Strategi kebijakan di dalam negeri 58
6.2.3 Narasi Publik 60
7 DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel

Tabel 1 GDP per kapita dan GNI per kapita (2022) negara anggota, kandidat, dan key partner OECD....16
Tabel 2 Persyaratan dalam Framework for the Consideration of Prospective Members....49

Grafik

Grafik 1 Tren Indeks Demokrasi Tiga Negara Anggota Terbaru OECD dibagi dalam Periode Waktu Pra-Aksesi, Aksesi, dan Pasca-Aksesi....33
Grafik 2 Worldwide Governance Indicators Kosta Rika (2012-2022) Dibagi per Periode Pra-Aksesi (Merah), Aksesi (Kuning), dan Pasca-Aksesi (Hijau)....34
Grafik 3 Worldwide Governance Indicators Kolombia (2012-2022) Dibagi per Periode Pra-Aksesi (Merah), Aksesi (Kuning), dan Pasca-Aksesi (Hijau)....34
Grafik 4 Worldwide Governance Indicators Lithuania (2012-2022) Dibagi per Periode Pra-Aksesi (Merah), Aksesi (Kuning), dan Pasca-Aksesi (Hijau)....35
Grafik 5 Perubahan Skor Corruption Perception Index Kosta Rika, Kolombia, dan Lithuania Periode 2012-2022....35
Grafik 6 Perubahan Skor Indeks Kebebasan Ekonomi Kosta Rika, Kolombia, dan Lithuania 2012 - 2023....37
Grafik 7 Skor Capaian Tujuan Berkelanjutan Lithuania, Kolombia, dan Kosta Rika Selama Masa Pra-Aksesi, Aksesi, dan Pasca-Aksesi ke OECD....37

1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia telah menjalin berbagai kemitraan global di bidang ekonomi. Salah satunya dengan menjadi *key partner* pada Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic and Co-operation Development*/OECD) sejak tahun 2007. Peran ini berpotensi untuk ditingkatkan mengingat membaiknya postur perekonomian Indonesia.

Bank Dunia mencatat *gross national income* (GNI) per kapita Indonesia mencapai USD 4.580,00 pada tahun 2022 yang artinya Indonesia sudah dianggap sebagai negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income country*).[1] Status ini sempat lepas akibat krisis pandemi COVID-19, tetapi pada bulan Juli 2023, Bank Dunia kembali menyatakan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Dalam hal ini, Visi Indonesia Emas 2045 ditetapkan sebagai target Indonesia untuk masuk kategori negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045.[2]

Presiden Joko Widodo tanggal 13 Juli 2023 menyetujui agar Indonesia segera dan masuk menjadi anggota OECD.[3] Negara kandidat harus menunjukkan kepatuhan terhadap standar OECD sesuai *Framework for the Consideration of Prospective Members*.

Aksesi Indonesia ke OECD juga berdampak terhadap aspek geopolitik dan geoekonomi. Keanggotaan Indonesia perlu dipastikan sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, rencana pembangunan nasional, kepemimpinan Indonesia di tingkat kawasan dan global, serta posisi Indonesia di antara negara-negara berkembang yang selama ini mencerminkan politik luar negeri Indonesia.

Kemudian, untuk menjadi anggota penuh OECD, diperkirakan diperlukan penyesuaian regulasi nasional terhadap instrumen-instrumen OECD yang mengikat (*legally binding*) dan tidak mengikat (*non-legally binding*).

Proses aksesi akan menjadi *exercise* baik bagi Indonesia dari segi kesiapan, maupun bagi OECD dari segi relevansi dan inklusivitas.[4]

1.2 TUJUAN

Tujuan reviu kebijakan ini adalah:

1. **Meninjau posisi dan peluang Indonesia pada aksesi ke OECD**, termasuk mengetahui kewajiban dan keuntungan menjadi anggota; kriteria keanggotaan; serta

---

[1] Negara berpendapatan menengah atas melewati GNI per kapita USD 4.466,00

[2] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Ringkasan Eksekutif Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, Dan Makmur* (Jakarta, 2019), 5.

[3] Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I: Proses Aksesi Keanggotaan Indonesia Pada OECD," July 27, 2023.

[4] Centre for Strategic and International Studies, "Indonesia Accession to OECD: Seeking Convergence," August 15, 2023. Disampaikan pada Expert Group Meeting: Geopolitical, Geo-economic, and Implications Aspects of Indonesia's Accession to the OECD – Public Narratives, Jakarta, 15 Agustus 2023.

kesenjangan (*gap*) yang mungkin dihadapi Indonesia selama proses aksesi. Kerja sama Indonesia dengan OECD sudah terjalin cukup lama sehingga memiliki peluang untuk ditingkatkan dengan menjadi anggota. Menjadi anggota OECD berarti Indonesia harus mematuhi berbagai standar OECD, sehingga penting diketahui sejauh mana kesenjangan antara kondisi riil Indonesia saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan sebagai anggota kelompok negara-negara maju.

2. **Meninjau aspek geopolitik, geoekonomi, dan implikasi dari aksesi Indonesia ke OECD**, termasuk mengevaluasi posisi Indonesia sebagai anggota OECD vis-à-vis posisi pada berbagai kelompok dan forum internasional, serta posisi pada rivalitas geopolitik baik pada tingkat regional maupun global.
3. **Mengkaji narasi publik yang perlu dibenahi untuk aksesi Indonesia ke OECD**. Pertimbangan dapat diberikan pada posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas dan prospek Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah untuk menjadi bangsa yang maju sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
4. **Mengambil pelajaran dari negara-negara lain**: (i) negara-negara yang relatif baru bergabung dengan OECD (misalnya, data mengenai manfaat pembangunan ekonomi, perdagangan intra dalam OECD, dan investasi dari negara-negara OECD dan non-OECD); dan (ii) negara-negara yang saat ini tergabung dalam proses aksesi (misalnya, tantangan dan manfaat dari proses aksesi).

1.3 Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam reviu kebijakan ini adalah:

1. Apa yang menjadi profil utama OECD dan apa artinya menjadi anggota OECD? Bagaimana perluasan OECD selama ini?
2. Proses, tahapan dan kriteria apa yang harus dipenuhi negara kandidat untuk proses aksesi ke OECD? Bagaimana kesiapan dan *state of play* Indonesia dalam proses tersebut?
3. Bagaimana pengalaman negara-negara yang relatif baru masuk OECD? Bagaimana pengalaman negara-negara kandidat? Apa yang dapat kita pelajari untuk proses aksesi Indonesia?
4. Aspek geopolitik dan geoekonomi apa yang perlu menjadi perhatian dalam proses aksesi Indonesia ke OECD? Tantangan apa saja yang perlu kita antisipasi dalam proses ini?

1.4 Metodologi

Reviu Kebijakan Mandiri ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengombinasikan *grounded theory* dengan studi kasus (*case study*). Kombinasi kedua metode tersebut mulai lazim dalam studi kualitatif dengan keunggulan dapat menguatkan reliabilitas, validitas, dan kemampuan generalisasi. Dengan kombinasi ini peneliti dapat menyusun desain penelitian yang kreatif dan inovatif agar dapat menjawab pertanyaan

penelitian.[5] Dalam hal ini, *grounded theory* menggunakan pendekatan induktif sehingga generalisasi ditarik secara bertahap dari observasi dan analisis data. Peneliti melakukan penjelajahan, lalu mengumpulkan data yang mendalam sehingga terbangun hipotesis. Kemudian dilakukan verifikasi atas hipotesis tersebut melalui pengumpulan data yang lebih mendalam sehingga dapat ditarik suatu generalisasi.[6] Selain itu, metode penelitian studi kasus (*case study*) merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang dapat menjawab beberapa isu atau obyek suatu fenomena. Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan perbedaan nilai, kepercayaan dan *scientific theory*.[7]

Data diperoleh melalui berbagai dokumen primer OECD di antaranya *Framework for the Consideration of Prospective Members*, *Noboru Report,* serta *Accession Roadmap* dari lima negara kandidat OECD, yaitu Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania. Data juga diperoleh dari KBRI Paris antara lain mengenai hasil pertemuan Dewan OECD dan pertemuan KBRI Paris dengan negara-negara OECD. Selain itu, data empiris diperoleh melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. *Expert Group Meeting: Geopolitical, Geo-economic, and Implications Aspects of Indonesia's Accession to OECD – Public Narratives* 15-16 Agustus 2023 bersama Direktur Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada, Departemen Ekonomi *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral - Kemenko Perekonomian, dan Direktorat Pendanaan Multilateral - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
2. *Focus Group Discussion: Lesson Learned and Best Practices with OECD Members and Candidates*, 15 – 16 Agustus 2023, dengan partisipasi PTRI New York, PTRI Jenewa, KBRI Bogota, KBRI Panama City, dan KBRI Buenos Aires. Selain itu, tim peneliti mendapatkan bahan masukan dari KBRI Brasilia dan KBRI Kopenhagen. Kegiatan Studi Kasus ini untuk mengetahui pengalaman aksesi negara-negara yang relatif baru bergabung dengan OECD yaitu Lithuania, Kolombia, dan Kosta Rika, serta negara-negara yang saat ini dalam proses aksesi yaitu Argentina dan Brazil. Hasil pertemuan FGD kemudian perkuat oleh bahan-bahan dari hasil pertemuan Perwakilan RI terkait dengan Kementerian/Lembaga di negara-negara anggota atau kandidat OECD, di antaranya dengan Kementerian Luar Negeri, Perdagangan Internasional, dan Agama Argentina dan Kementerian Luar Negeri Lithuania.
3. *Limited Discussion: State of Play and Potential Benefits for Accession to the OECD*, 21 Agustus 2023. Diskusi Terbatas ini dilakukan bersama *Deputy Director for Legal Affairs OECD Secretariat, Head of South and Southeast Asia*, yang difasilitasi oleh KBRI Paris.

---

[5] Yusri Arshad, Abdul Rahman Ahlan, and Sharifah Norhafiza Syed Ibrahim, "Combining Grounded Theory and Case Study Methods in IT Outsourcing Study," *Journal of Information System Research and Innovation*, 2013, 84–93.

[6] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2014); Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

[7] Denise F. Polit and Cheryl Tatano Beck, *Nursing Research: Principles and Methods*, 7th ed. (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 2003); Sally Borbasi, Debra Jackson, and Rae Langford, *Navigating the Maze of Nursing Research: An Interactive Learning Adventure* (Marrickville: Elsevier Australia, 2004).

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, tim peneliti berkomunikasi secara intens dengan *Head of OECD Jakarta Office* dan memperoleh pendalaman data.

1.5 STRUKTUR

Reviu Kebijakan Mandiri ini dibagi menjadi 6 (enam) bab sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
Bab II	Profil dan Perluasan Keanggotaan OECD
Bab III	Proses dan Kriteria Aksesi ke OECD
Bab IV	Pelajaran dan Praktik Terbaik
Bab V	Analisis Kebijakan Strategi Aksesi Indonesia ke OECD
Bab VI	Rekomendasi Strategi Kebijakan dan Narasi Publik

2 PROFIL DAN PERLUASAN KEANGGOTAAN OECD

2.1 PROFIL OECD

2.1.1 Pendirian

Pembentukan OECD tidak terlepas dari kondisi dunia setelah Perang Dunia II. Guna merekonstruksi Eropa, dibentuklah *Organisation for European Economic Co-operation* (OEEC) pada tahun 1948.

OEEC berfungsi mengelola bantuan Amerika Serikat dan Kanada di bawah Marshall Plan. OEEC beranggotakan 18 negara Eropa yaitu Inggris, Denmark, Islandia, Norwegia, Turki, Portugal, Prancis, Irlandia, Belgia, Yunani, Swedia, Swiss, Austria, Belanda, Luksemburg, Italia, Jerman, dan Spanyol.

Kemudian, pada tanggal 14 Desember 1960, 18 negara OEEC beserta Amerika Serikat dan Kanada menandatangani *Convention on the OECD* di Château de la Muette, Paris. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal 30 September 1961 sekaligus menandakan transformasi OEEC menjadi OECD.

2.1.2 Agenda dan Tujuan

Mayoritas negara OECD berstatus *very high* dalam Indeks Pembangunan Manusia sehingga organisasi ini sering dianggap sebagai perkumpulan negara-negara maju.

OECD berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, mendorong kesetaraan, mengoptimalkan akses dan kesempatan yang adil, serta meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota, maupun masyarakat tidak saja bagi negara-negara anggota, tetapi juga berdampak secara global.

OECD bekerja sama dengan pemerintah, pengambil kebijakan, dan elemen masyarakat untuk mencapai berbagai tujuannya. OECD mengedepankan pembentukan standar internasional berbasis bukti empiris untuk menemukan solusi bagi berbagai tantangan global, dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Dalam upaya peningkatan performa ekonomi, OECD telah merumuskan strategi kolaboratif, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan sistem pendidikan yang kuat guna menyongsong masa depan yang dinamis. OECD juga aktif memerangi praktik penghindaran pajak internasional yang merugikan perekonomian nasional dan global.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dewan OECD merupakan badan pembuat kebijakan tertinggi yang terdiri dari para Duta Besar negara-negara anggota, dan *European Commission*, yang mengambil keputusan secara konsensus. Dewan OECD bertemu secara reguler membahas isu-isu kunci dalam organisasi termasuk isu perluasan keanggotaan.

Setiap tahun Dewan OECD bertemu dalam *OECD Ministerial Council Meeting* (OECD MCM) yang diikuti oleh para Kepala Negara/Pemerintahan beserta Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan, dan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota. MCM bertemu

untuk melakukan pengawasan dan menetapkan prioritas OECD, mendiskusikan masalah ekonomi dan perdagangan global, serta membahas isu anggaran dan proses aksesi negara kandidat.

OECD memiliki lebih dari 300 komite, kelompok ahli, dan kelompok kerja yang mencakup hampir semua area pembuatan kebijakan. Komite mengusulkan solusi, menilai data dan keberhasilan kebijakan, serta meninjau implementasi kebijakan negara-negara anggota.

OECD juga memiliki Sekretariat di Paris dan terdiri dari berbagai direktorat dan divisi yang memberikan laporan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sejak 1 Juni 2021, Sekjen OECD dijabat oleh Mathias Cormann, Menteri Keuangan Australia pada 2013 - 2020.

2.2 Perluasan Keanggotaan OECD

2.2.1 Sejarah Perluasan Keanggotaan OECD

Sejak didirikan tahun 1961, OECD telah mengalami ekspansi keanggotaan dari 20 menjadi 38 anggota. Negara anggota OECD pada prinsipnya merupakan negara demokrasi yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, melindungi hak asasi manusia, serta menjalankan ekonomi yang terbuka, transparan, dan pasar bebas. Prinsip ini secara umum berlaku bagi negara kandidat yang ingin bergabung dengan OECD.

Perluasan pertama dimulai dengan Jepang tahun 1964 yang dinilai strategis karena merupakan satu-satunya anggota di luar kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara. Kemudian, disusul Finlandia (1969), Australia (1971), Selandia Baru (1973), Meksiko (1994), Republik Ceko (1995), Hongaria, Polandia, Korea Selatan (1996), hingga Slowakia (2000).

Pada tahun 2004, ketika Keketuaan OECD dipegang Jepang, Duta Besar Seiichiro Noboru mengeluarkan laporan C(2004)60 atau *Noboru Report* yang menerapkan 4 (empat) kriteria untuk menilai kandidat negara untuk aksesi yaitu: (i) *like-mindedness*, (ii) *significant player*, (iii) *mutual benefit*, dan (iv) *global considerations*.

Pada tahun 2007 kriteria ini menjadi pegangan OECD dalam mekanisme aksesi bagi 5 (lima) negara, yaitu Chile, Estonia, Israel, Slovenia, dan Rusia. Tahun 2010 Chile, Estonia, Israel, dan Slovenia resmi bergabung OECD, namun proses aksesi Rusia dihentikan tahun 2014 menyusul aneksasi Krimea oleh Rusia.

Pada tahun 2013 perluasan OECD berlanjut dengan adopsi *Accession Roadmap* untuk Kolombia dan Lavia. Kedua negara memiliki kemampuan berbeda-beda dalam penerapan *accession roadmap*. Latvia berhasil diterima tahun 2016, sedangkan Kolombia baru tahun 2020.

Pada tahun 2015 Dewan OECD mengadopsi *accession roadmap* untuk Lithuania dan Kosta Rika. Lithuania menjadi anggota pada tahun 2018, sementara Kosta Rika tahun 2021.

2.2.2 Negara Kandidat OECD

Pada tanggal 25 Januari 2022 Dewan OECD kembali membuka diskusi aksesi dengan 6 (enam) kandidat anggota, yaitu Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania.

Pada tanggal 10 Juni 2022, semua negara kandidat tersebut telah mendapatkan *accession roadmap* oleh Dewan OECD, kecuali Argentina.[8]

OECD memandang 5 (lima) negara *key partners* yaitu Brazil, China, India, Indonesia, dan Afrika Selatan sebagai kandidat potensial karena memiliki posisi strategis di kawasan masing-masing, dan OECD memberikan perhatian khusus bagi Asia Tenggara.[9]

Sebagai catatan, mayoritas negara anggota OECD merupakan *high-income country* dengan GNI per kapita sebesar USD 13.846 atau lebih (Tabel 1). Kosta Rika, Türkiye, Meksiko, dan Kolombia berada pada kategori *upper-middle income country* seperti Indonesia. Namun, GNI per kapita Indonesia (USD 4.580) berada di bawah Kolombia (USD 6.510) yang paling rendah di OECD. Di antara *key partner*, Indonesia hanya unggul dari India (GNI per kapita USD 2.380) yang masih berada di kategori *lower-middle income country*.

Tabel 1 GDP per kapita dan GNI per kapita (2022) negara anggota, kandidat, dan key partner OECD

Countries	OECD Status	GDP per capita, PPP (current international $)	GNI per capita, Atlas method (current US$)	Income
OECD members		53,854.02	44,885.92	
Norway	OECD Member	114,898.76	95,510.00	High-Income
Switzerland	OECD Member	83,598.45	89,450.00	High-Income
Ireland	OECD Member	126,905.20	81,070.00	High-Income
United States	OECD Member	76,398.59	76,370.00	High-Income
Denmark	OECD Member	74,005.48	73,200.00	High-Income
Iceland	OECD Member	69,081.26	68,220.00	High-Income
Sweden	OECD Member	64,578.40	62,990.00	High-Income
Australia	OECD Member	62,625.36	60,430.00	High-Income
Netherlands	OECD Member	69,577.40	57,430.00	High-Income
Austria	OECD Member	67,935.85	56,140.00	High-Income
Israel	OECD Member	49,509.13	54,650.00	High-Income
Finland	OECD Member	59,026.71	54,360.00	High-Income

[8] OECD, "*Accession to the Organisation*," diakses tanggal Oktober 11, 2023, https://www.oecd.org/legal/accession-process.htm.

[9] OECD, "*Report of the Chair of the Working Group on the Future Size and Membership of the Organisation to Council at the Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 7-8 June 2017 and the Framework for the Consideration of Prospective Members*" (Paris, 2017), v. 5.

Germany	OECD Member	63,149.60	53,390.00	High-Income
Canada	OECD Member	58,399.55	52,960.00	High-Income
United Kingdom	OECD Member	54,602.54	48,890.00	High-Income
Belgium	OECD Member	65,027.29	48,700.00	High-Income
New Zealand	OECD Member	51,966.86	48,460.00	High-Income
France	OECD Member	55,492.57	45,860.00	High-Income
Japan	OECD Member	45,572.72	42,440.00	High-Income
Italy	OECD Member	51,864.98	37,700.00	High-Income
Korea, Rep.	OECD Member	50,069.82	35,990.00	High-Income
Spain	OECD Member	45,825.20	31,680.00	High-Income
Slovenia	OECD Member	50,031.66	30,600.00	High-Income
Estonia	OECD Member	46,697.36	27,640.00	High-Income
Czechia	OECD Member	49,945.50	26,590.00	High-Income
Portugal	OECD Member	41,451.61	25,800.00	High-Income
Lithuania	OECD Member	48,396.69	23,690.00	High-Income
Slovak Republic	OECD Member	37,459.47	22,060.00	High-Income
Greece	OECD Member	36,834.87	21,740.00	High-Income
Latvia	OECD Member	39,956.19	21,500.00	High-Income
Croatia	Candidate	40,379.57	19,470.00	High-Income
Hungary	OECD Member	41,906.66	19,010.00	High-Income
Poland	OECD Member	43,268.54	18,350.00	High-Income
Romania	Candidate	41,887.92	15,660.00	High-Income
Chile	OECD Member	30,208.81	15,360.00	High-Income
Bulgaria	Candidate	33,582.28	13,250.00	Upper-Middle
China	Key Partner	21,475.61	12,850.00	Upper-Middle
Costa Rica	OECD Member	24,922.66	12,670.00	Upper-Middle
Argentina	Candidate	26,504.59	11,620.00	Upper-Middle

Türkiye	OECD Member	37,273.70	10,590.00	Upper-Middle
Mexico	OECD Member	21,512.27	10,410.00	Upper-Middle
Brazil	Candidate/	17,821.74	8,140.00	Upper-Middle
	Key Partner			Upper-Middle
South Africa	Key Partner	15,904.85	6,780.00	Upper-Middle
Peru	Candidate	15,047.52	6,770.00	Upper-Middle
Colombia	OECD Member	20,287.40	6,510.00	Upper-Middle
Indonesia	Key Partner	14,652.93	4,580.00	Upper-Middle
India	Key Partner	8,379.06	2,380.00	Lower-Middle

Sumber: Data Bank Dunia, 2023.

Catatan: Kategorisasi ini berdasarkan pendapatan negara menurut perhitungan GNI per kapita yang diukur dengan metode Atlas oleh Bank Dunia. Kategori yang berlaku saat ini adalah: (i) *low-income economies* (GNI per kapita USD 1.135 atau lebih rendah); (ii) *lower-middle income economies* (GNI per kapita USD 1.136 – USD 4.465); (iii) *upper-middle-income economies* (GNI per kapita USD 4.466 – USD 13.845); dan (iv) *high-income economies* (GNI per kapita USD 13.846 atau lebih).

3 PROSES DAN KRITERIA AKSESI KE OECD

3.1 PROSES AKSESI

Negara kandidat harus melalui beberapa tahapan (untuk) menjadi anggota penuh OECD: pra-aksesi, aksesi, dan pasca-aksesi. [10]

3.1.1 Pra-Aksesi

Tahap pra-aksesi mencakup ekspresi minat (*expression of interest*) dan evaluasi awal (*initial assessment*).[11] Indonesia masih pada tahap pra-aksesi ini. Tahapan ini lebih bersifat politis sehingga perlu *high political lobby*.[12]

1. Ekspresi minat. Negara kandidat harus mengajukan aplikasi resmi untuk bergabung dengan OECD melalui surat resmi dan ditujukan kepada Sekjen OECD.
2. Evaluasi Awal. Sekjen OECD akan melakukan evaluasi awal kesiapan negara kandidat untuk aksesi ke OECD mengenai kebijakan ekonomi, kerangka hukum, dan komitmen kepatuhan (*compliance*) terhadap nilai dan standar OECD. Evaluasi dilakukan berdasarkan *Framework for the Consideration of Prospective Members*.

   Framework tersebut menjadi acuan bagi Sekjen OECD dalam menyusun proposal aksesi Indonesia untuk disampaikan kepada Dewan OECD. Proposal memuat profil Indonesia yang mencakup, antara lain, situasi ekonomi, integrasi pada organisasi internasional lain, kesesuaian dengan standar OECD, dan tingkat komitmen.
   Selain itu, Sekjen OECD akan mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi di negara kandidat sebagai salah satu bahan pertimbangan menjadi anggota OECD. Sekjen OECD akan menyampaikan evaluasi awal ini kepada Dewan OECD.

Secara formal, Indonesia baru berada pada tahap **pra-aksesi**. Ekspresi minat sudah disampaikan melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 14 Juli 2023 kepada Sekjen OECD. Surat tersebut telah ditanggapi oleh Sekjen OECD pada tanggal 26 Juli 2023 untuk dibahas pada pertemuan Dewan OECD bulan September 2023.[13] Sementara itu, wacana bergabungnya Indonesia pada OECD sudah mengemuka ketika Presiden RI menerima Sekjen OECD di Jakarta, tanggal 10 Agustus 2023.[14] Ada pun surat ekspresi minat Indonesia telah dibawa oleh Sekretariat OECD ke pertemuan Dewan OECD, 13 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Dewan OECD masih melakukan

---

[10] Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM), "Setting the Scene for Indonesia's Accession to the OECD," August 8, 2023. Dipaparkan pada *Expert Group Meeting: Geopolitical, Geo-economic, and Implications Aspects of Indonesia's Accession to the OECD - Public Narratives*, Jakarta 15 Agustus 2023

[11] Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris, "Brief Note: Proses Menjadi Anggota OECD," June 15, 2023, 1–2.

[12] Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM), "Setting the Scene for Indonesia's Accession to the OECD."

[13] Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I: Proses Aksesi Keanggotaan Indonesia Pada OECD."

[14] Sekretariat Kabinet, "OECD Apresiasi Kepemimpinan Presiden Jokowi Lakukan Langkah Reformasi Di Indonesia," 2023, https://setkab.go.id/oecd-apresiasi-kepemimpinan-presiden-jokowi-lakukan-langkah-reformasi-di-indonesia/.

evaluasi awal terhadap proposal Indonesia. Proses evaluasi ini memerlukan waktu untuk dibahas pada pertemuan bulanan Dewan OECD berikutnya.[15]

3.1.2 Aksesi

Proses aksesi mencakup berbagai tahapan, yaitu:[16]

a. Diskusi aksesi (*accession discussion*). Dewan OECD melakukan pertimbangan atas evaluasi awal Sekretariat OECD. Dewan OECD akan memutuskan secara konsensus untuk membuka diskusi dengan negara kandidat. Diskusi aksesi akan berlangsung antara negara-negara OECD dan negara kandidat melalui Komite-Komite di OECD.
b. Peta jalan aksesi (*accession roadmap*). Dewan OECD akan menyetujui usulan Sekretariat OECD apabila negara kandidat dipandang memiliki kapasitas dan potensi menjadi anggota OECD. Dalam hal ini, Dewan OECD akan meminta Sekjen OECD membuat *accession roadmap* yang biasanya disahkan pada pertemuan *OECD Ministerial Council Meeting* (OECD MCM).

   Accession roadmap merupakan serangkaian rekomendasi dari negara-negara anggota OECD yang harus dipenuhi oleh negara kandidat. Negara kandidat perlu memenuhi semua instrumen hukum OECD sebanyak 271 instrumen (per Juni 2023). Instrumen hukum ini dapat berupa *decisions*, *recommendations*, *substantive outcome documents*, *international agreements*, dan *arrangement* yang disepakati.

c. Implementasi Reformasi (*implementation of reform*). Negara kandidat perlu melakukan reformasi kerangka hukum domestik agar selaras dengan standar OECD sesuai rekomendasi tertulis *accession roadmap*. Dalam melakukan implementasi reformasi sesuai *Roadmap*, ada beberapa langkah yang harus dilakukan:[17]

   i. *Initial Memorandum*. Setelah *accession roadmap* diadopsi, negara kandidat harus melakukan *self-assessment* tingkat keselarasan peraturan, kebijakan, dan praktik dengan instrumen hukum OECD. Hasil *self-assessment,* berupa *initial memorandum* negara kandidat, akan disampaikan kepada OECD.

   ii. *Committee Reviews*. Dari keseluruhan tahap aksesi, tahap ini paling kompleks dan membutuhkan waktu cukup lama (tahunan). Sebanyak 24 hingga 26 Komite OECD akan melakukan penilaian terhadap: (i) keinginan dan kemampuan negara kandidat untuk implementasi instrumen hukum OECD; dan (ii) kebijakan dan praktik negara kandidat dikomparasikan dengan kebijakan dan praktik baik OECD. Hasil dari reviu ini biasanya berupa rekomendasi perubahan peraturan, kebijakan, dan praktik yang harus dilakukan negara kandidat agar selaras dengan standar OECD.

---

[15] Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris, "Hasil Pertemuan OECD Council Tentang Rencana Aksesi Indonesia Di OECD, 13 September 2023," September 14, 2023.
[16] Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris, "Brief Note: Proses Menjadi Anggota OECD," 2–3.
[17] OECD, "The OECD Accession Process," July 2023.

iii. *Formal Opinion*. Setiap Komite akan merangkum evaluasi mereka dalam bentuk *formal opinion* apabila negara kandidat dianggap berhasil menyelaraskan kebijakan dengan standar OECD.

d. Ratifikasi dan Aksesi (*ratification and accession*). Proses aksesi pada intinya adalah reformasi yang dilakukan negara kandidat untuk menerapkan *accession roadmap*. Proses ini dianggap sebagai katalis bagi negara kandidat untuk mempercepat reformasi agar sesuai standar OECD.

   Keanggotaan OECD negara kandidat dapat diresmikan melalui proses aksesi apabila OECD MCM menilai semua standar sudah dipenuhi oleh negara kandidat. Setelah negara kandidat menyelesaikan prosedur dalam negeri untuk aksesi ke Konvensi OECD, maka negara kandidat resmi menjadi negara anggota OECD.
   Negara kandidat dikatakan resmi mengikuti proses aksesi ketika *accession roadmap* negara tersebut sudah diadopsi oleh Dewan OECD. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan aksesi antara negara kandidat dengan OECD.

3.1.3 Pasca-Aksesi

Tahap pasca-aksesi mungkin terjadi apabila Dewan OECD memutuskan negara yang sudah aksesi melaporkan implementasi instrumen hukum OECD yang dinilai belum sepenuhnya tercapai. Berbeda dengan proses akses yang tidak dibatasi waktu, pelaporan pasca-aksesi dibatasi oleh rentang waktu tertentu pada masing-masing Komite. Beberapa negara yang baru bergabung, seperti Kolombia dan Kosta Rika, diberlakukan tahapan pasca-aksesi.

3.2 Kriteria Anggota OECD

Kandidat OECD dapat merujuk pada *Framework for the Consideration of Prospective Members* khususnya pada *State of Readiness* pada Annex I. Hal penting terkait kesiapan Indonesia berdasarkan *State of Readiness* yang perlu ditinjau yaitu:

3.2.1 Economic and Public Governance

OECD akan melakukan evaluasi tata kelola ekonomi dan tata kelola publik negara kandidat dengan beberapa indikator.

a. **Ekonomi pasar terbuka berbasis peraturan perundang-undangan**
   - Indonesia telah melakukan *OECD Investment Policy Review* tahun 2010 dan 2020. Kedua reviu menekankan pentingnya penanaman modal asing (FDI). Pada reviu tahun 2010, kemajuan Indonesia untuk keluar dari krisis akhir 1990-an melalui penerapan regulasi yang transparan dan akuntabel telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan FDI. FDI dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan produk ekspor.[18] Sedangkan pada reviu tahun 2020, FDI dinilai dapat membantu Indonesia keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19. FDI dinilai

[18] OECD, *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2010* (Paris: OECD, 2010), 19–21.

bermanfaat bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, menyokong integrasi rantai nilai global (*global value chain*/GVC), menciptakan lebih banyak lapangan kerja, kontribusi terhadap pembangunan *human capital*, pengembangan teknologi yang lebih bersih, serta mendorong terciptanya tempat kerja yang inklusif gender.[19]

- Indonesia dalam kapasitasnya sebagai anggota G20 telah menyepakati *Leaders' Declaration* yang memuat *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Dokumen tersebut memuat panduan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerangka legal, regulasi, dan institusi tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan akses keuangan, terutama pada pasar modal; menyediakan kerangka perlindungan investor; dan mendukung keberlanjutan dan resiliensi. Dokumen ini diadopsi oleh Dewan OECD pada 8 Juli 2015 dan direvisi pada 8 Juni 2023.[20] Revisi tersebut telah disetujui pada *G20 New Delhi Leaders' Declaration 2023*.[21]
- Indonesia kemungkinan masih perlu menaati beberapa instrumen, seperti *Declaration on International Investment and Multinational Enterprises* dan *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*.

b. **Transparansi pajak dan kerja sama internasional**. Indonesia kemungkinan dapat memenuhi indikator ini karena telah menjadi bagian dari *OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dan *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*.

c. **Sistem keuangan yang stabil dan transparan**. Negara kandidat OECD dapat mengacu pada *Code of Liberalisation of Capital Movements* dan *Code of Liberalisation of Current Invisible Operations*.

d. **Akses informasi**. Dalam menjamin akses terhadap informasi, OECD mendorong agar negara kandidat menaati dua rekomendasi, yaitu mengenai *Good Statistical Practice* dan *Principles for Internet Policy Making*.

3.2.2 Kemampuan (*ability*), Kapasitas (*capacity*), dan Pelibatan (*engagement*)

Kemampuan, kapasitas, dan pelibatan berperan penting dalam upaya negara kandidat dapat menjadi anggota OECD.

a. **Kemampuan**. Negara kandidat OECD harus menunjukkan kemampuan untuk menjalani proses aksesi dan kewajiban keanggotaan dengan menyediakan sumber daya yang cukup dan siap berkoordinasi selama proses aksesi.

---

[19] OECD, *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020* (Paris: OECD, 2020), https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b56512da-en/1/3/2/index.html?itemId=/content/publication/b56512da-en&_csp_=3566eda5c71b885d65a0049c7e7c9b6d&itemIGO=oecd&itemContentType=book.
[20] OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023* (Paris: OECD, 2023).
[21] G20, *G20 New Delhi Leaders' Declaration, New Delhi, India, 9-10 September 2023* (New Delhi: G20, 2023), para. 71.

b. **Kapasitas**
   - OECD akan melihat **kapasitas** negara kandidat dalam membandingkan data dan analisis berdasarkan bukti, serta pengembangan kebijakan berbasis bukti. Negara kandidat diharapkan melakukan paling tidak satu *peer review*, terutama *Public Governance Review*, *Regulatory Policy Review*, *Economic Survey*, dan *Corporate Governance Review*.
   - Negara diharapkan memiliki kapasitas untuk menyediakan data yang dibutuhkan untuk setidaknya satu publikasi unggulan OECD, seperti *Going for Growth*, *Education at a Glance*, atau *Government at a Glance*.

c. **Pelibatan**. OECD juga menilai seberapa jauh pelibatan negara kandidat di berbagai komite substantif OECD. Hal ini bisa dilakukan dengan menjadi partisipan atau memperoleh status sebagai asosiasi/anggota pada komite-komite OECD.

3.2.3 Reach and Impact

Kriteria yang dilihat dari indikator ini adalah peran regional dan global negara kandidat pada ekonomi dunia. Keanggotaan yang konstruktif di berbagai organisasi atau institusi internasional dan regional dianggap konsisten dengan tujuan-tujuan OECD, terutama apabila dapat ditunjukkan kontribusi dan dukungan terhadap tata kelola global dan regional.

3.3 KONDISI INDONESIA

3.3.1 Indonesia sebagai *Key Partner OECD*

Indonesia memiliki modalitas untuk menjadi anggota OECD, antara lain, kepemimpinan regional dan global Indonesia, seperti di G20 dan ASEAN; status sebagai negara berpendapatan menengah atas; dan demokrasi yang stabil.

Indonesia menjadi *key partner* sejak tahun 2007 dan merupakan *key partner* pertama yang menandatangani *Framework of Cooperation Agreement* (FCA) tahun 2012 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. FCA Indonesia-OECD telah diperbaharui tahun 2017 dan 2022.

Berdasarkan FCA, Indonesia dan OECD telah menandatangani sebanyak 4 (empat) *Joint Work Programme* (JWP) (periode 2015-2016, 2017-2018, 2019-2021, dan 2022-2025). JWP ke-4 ditujukan untuk mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025, mencapai pemulihan berkelanjutan pasca-krisis COVID-19, serta semakin mendekatkan Indonesia dengan standar-standar OECD.

Selain itu, Indonesia telah bergabung pada *OECD Development Centre* untuk berbagi pengetahuan mengenai kebijakan inovatif untuk mempercepat pembangunan. Indonesia juga turut mendukung pembentukan *OECD Southeast Asia Regional Programme* tahun 2014.

Indonesia sebagai *key partner* OECD sejak tahun 2007 telah mengaksesi 12 instrumen OECD. Indonesia telah menandatangani *Privileges and Immunities Agreement* tahun 2013 dan diikuti dengan pembukaan kantor regional pertama OECD di Asia Tenggara di Jakarta tahun 2015.

Proses aksesi dapat dianggap sebagai keberlanjutan dari proses yang telah dimulai saat menjadi *key partners*. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa masih cukup banyak instrumen OECD yang perlu diselaraskan dengan kondisi di Indonesia.

3.3.2 Posisi Indonesia di OECD

Dalam proses aksesi, Indonesia akan ditinjau oleh paling tidak 20 Komite OECD. Masing-masing komite terdapat perwakilan dari 38 negara anggota OECD. Selama proses aksesi, Indonesia perlu berpartisipasi dan berinteraksi dengan komite-komite tersebut. Secara prinsip, komite tidak tertarik untuk menghasilkan rekomendasi yang tidak dapat diterapkan bagi negara kandidat.[22]

Dewan OECD rutin mengadakan pertemuan bulanan untuk membahas arah kebijakan organisasi. Pada pertemuan bulanan yang berlangsung pada 13 September 2023 di Paris, untuk pertama kalinya dibahas rencana aksesi Indonesia. Beberapa dukungan positif yang patut dicatat pada pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut: [23]

a. Dari 38 negara anggota OECD, tidak ada satu pun negara yang menyatakan keberatan atas rencana aksesi Indonesia di OECD.

b. Dukungan kuat disampaikan oleh Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Türkiye.

c. Jerman dan Prancis menyatakan telah mendapatkan instruksi Pusat untuk mendukung rencana aksesi Indonesia.[24]

Selain itu, beberapa negara yang menyampaikan dukungan dengan catatan, yaitu:[25]

a. Amerika Serikat mendukung, tetapi menyatakan perlu waktu secara internal untuk membahas rencana aksesi Indonesia dengan semua kementerian/lembaga di AS.

b. Finlandia mendukung, namun menyampaikan ingin melihat perkembangan *accession roadmap* 6 (enam) negara kandidat yang sedang menjalani proses aksesi. Finlandia khawatir rencana aksesi Indonesia akan mengganggu proses aksesi keenam negara tersebut karena keterbatasan kapasitas Sekretariat dan Komite melakukan evaluasi.

c. Spanyol mendukung tetapi menekankan OECD perlu memberikan pemahaman kepada Indonesia bahwa proses aksesi memakan waktu lama dan tidak bisa terburu-buru.

Sementara itu, secara terpisah Kantor Regional OECD di Jakarta menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan Dewan OECD tersebut, keputusan proses aksesi Indonesia akan diambil

---

[22] OECD Secretariat, "Paparan Pada Kegiatan 'Limited Discussion: State of Play and Potential Benefits for Accession to the OECD,'" August 21, 2023.
[23] Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris, "Hasil Pertemuan OECD Council Tentang Rencana Aksesi Indonesia Di OECD, 13 September 2023."
[24] Prancis menyampaikan bahwa dukungan mereka telah disampaikan secara langsung oleh Menlu Prancis kepada Menlu RI pada pertemuan 2+2 bulan Juli 2023 dan oleh Presiden Macron kepada Presiden Jokowi pada pertemuan bilateral di sela-sela KTT G20 di India awal September lalu.
[25] Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris, "Hasil Pertemuan OECD Council Tentang Rencana Aksesi Indonesia Di OECD, 13 September 2023."

setelah Sekjen OECD memastikan proses aksesi ini mendapatkan dukungan penuh seluruh anggota OECD. Aksesi Indonesia kemungkinan akan dibahas kembali pada pertemuan Dewan OECD bulan Desember 2023 atau Januari 2024.[26]

[26] OECD Jakarta Office, "Penyampaian Sebagai Tindak Lanjut Kegiatan Limited Discussion: State of Play and Potential Benefits for Accession to the OECD," August 18, 2023.

4 PELAJARAN DAN PRAKTIK TERBAIK

Indonesia dapat mengambil pelajaran dan praktik terbaik dari negara yang relatif baru bergabung dengan OECD (Kosta Rika, Kolombia, dan Lithuania) maupun negara yang sedang dalam tahapan aksesi (Brazil dan Argentina).

Dari tiga negara yang telah bergabung, proses aksesi bervariatif dari segi waktu diukur dari waktu ditetapkannya *accession roadmap* hingga resmi menjadi anggota OECD. Kosta Rika memerlukan waktu 6 (enam) tahun (2015 - 2021), Kolombia 7 (tujuh) tahun (2013 - 2020), tetapi Lithuania hanya memerlukan waktu 3 (tiga) tahun (2015 - 2018).

4.1 NEGARA YANG RELATIF BARU BERGABUNG OECD

4.1.1 Kosta Rika

Kosta Rika menjadi negara anggota OECD keempat dari kawasan Amerika Latin setelah Meksiko, Chile, dan Kolombia sekaligus menggenapi keanggotaan organisasi ini menjadi 38 negara. *Accession roadmap* Kosta Rika pertama kali diadopsi pada tahun 2015 dan berhasil diimplementasikan sehingga proses aksesi bagi Kosta Rika selesai tahun 2021 (proses aksesi 6 tahun).

Proses aksesi yang dilakukan Kosta Rika mencakup tinjauan teknis secara mendalam oleh 22 Komite OECD serta reformasi besar untuk menyelaraskan undang-undang, kebijakan, dan praktik agar sesuai dengan standar dari OECD.[27]

Alasan Kosta Rika bergabung dengan OECD, antara lain: kesempatan membahas masalah dan tantangan kebijakan utama dalam lingkup multilateral; serta mengambil manfaat untuk belajar pengalaman negara-negara OECD dalam menghadapi berbagai tantangan serupa di berbagai bidang.[28]

Kosta Rika dinilai berhasil melakukan pemulihan ekonomi berkat komitmennya terhadap perdagangan sehingga menjadi kunci dalam menarik investasi asing, diversifikasi ekspor, dan meningkatkan rantai nilai global.[29]

Tantangan Kosta Rika selama proses aksesi, antara lain:

a. Masalah defisit fiskal yang berpotensi berdampak pada peringkat kredit negara sehingga mengharuskan Kosta Rika melakukan pemotongan pengeluaran pemerintah.

[27] OECD, "OECD Welcomes Costa Rica as Its 38th Member," May 25, 2021, https://www.oecd.org/costarica/oecd-welcomes-costa-rica-as-its-38th-member.htm.
[28] OECD, "The OECD and Costa Rica: A Mutually Beneficial Relationship," accessed August 22, 2023, https://www.oecd.org/latin-america/countries/costa-rica/.
[29] OECD, "Costa Rica: Strengthening Public Finances, Productivity and Education Is Key to Continued Progress, Says OECD," February 6, 2023, https://www.oecd.org/newsroom/costa-rica-strengthening-public-finances-productivity-and-education-is-key-to-continued-progress.htm.

Hal ini merupakan tantangan utama karena terdapat kebutuhan Kosta Rika untuk melakukan investasi infrastruktur.[30]

b. Tantangan bidang sosial dan ekonomi, seperti kualitas tenaga kerja rendah (banyak tenaga kerja informal), peningkatan ketidaksetaraan, tingkat kemiskinan yang tinggi, serta risiko pengucilan ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki lahan dan kaum imigran.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Kosta Rika melakukan berbagai perubahan di bidang teknologi dan mendorong pertumbuhan inklusif berkelanjutan.[31]

Dengan bergabung pada OECD, **Kosta Rika mendapatkan berbagai manfaat**, seperti:

a. Perekonomian Kosta Rika mencapai kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir serta dinilai menunjukkan kinerja yang baik dalam menghadapi tantangan global.
b. Kondisi fiskal Kosta Rika dinilai membaik selama proses aksesi ke OECD. Defisit anggaran mampu diturunkan hingga 5% dari total GDP pada tahun 2021. Hal ini memungkinkan berkat adanya pembatasan pertumbuhan belanja negara oleh berbagai aturan fiskal yang berstandar OECD.[32]
c. Survei ekonomi OECD terhadap Kosta Rika menunjukkan peningkatan standar hidup yang lebih cepat dari pada rata-rata negara di kawasan Amerika Latin lainnya dalam dua dekade terakhir.[33]

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan Kosta Rika di mana **OECD menyarankan beberapa tindakan**:[34]

a. Efisiensi penerimaan dari pajak. Utang pemerintah Kosta Rika sebesar 70% dari PDB dengan tingkat suku bunga lebih dari 5% dari PDB. Kosta Rika termasuk negara dengan pendapatan pajak terendah di antara negara-negara OECD, dan pengeluaran pajaknya besar, hingga 4% dari PDB.

   Kosa Rika perlu mematuhi rencana fiskal jangka menengah untuk turunkan defisit secara bertahap melalui peningkatan efisiensi belanja dan penerimaan pajak.

   OECD juga sarankan agar Kosta Rika menghapuskan pengecualian pajak yang selama ini hanya menguntungkan wajib pajak yang lebih kaya. Dengan begitu, pendapatan dari pajak dapat ditingkatkan tanpa perlu menaikkan tarif pajak secara keseluruhan.

b. Dorong peningkatan tenaga kerja formal. Kosta Rika memiliki angka tenaga kerja informal yang tinggi. OECD mendorong agar sistem pajak tidak membebani pemberi kerja untuk membayar iuran sosial.

---

[30] International Trade Administration United States of America, "Costa Rica - Country Commercial Guide," March 30, 2023, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/costa-rica-market-challenges#:~:text=Costa Rica is facing fiscal,rail%2C roads%2C and bridges.
[31] OECD, *OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Costa Rica* (Paris: OECD, 2017).
[32] OECD.
[33] OECD, "Costa Rica: Strengthening Public Finances, Productivity and Education Is Key to Continued Progress, Says OECD."
[34] OECD.

Dengan begitu pemberi kerja dapat terdorong mempekerjakan lebih banyak orang di sektor formal. Hal ini akang mengurangi jumlah tenaga kerja informal di Kosta Rika yang selama ini tidak dilindungi undang-undang.

c. Peningkatan produktivitas dan persaingan di sektor-sektor kunci. OECD mendorong Kosta Rika meningkatkan infrastruktur transportasi dengan memperbaiki kualitas jalan dan mengurangi kemacetan agar dapat meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga didorong untuk perkuat pasar-pasar kunci seperti beras dan jasa profesional.

d. Dorong pemerataan manfaat integrasi perdagangan. OECD juga mendorong Kosta Rika untuk menggabungkan sektor ekspor yang dinamis dengan sektor domestik yang terdiri dari UMKM yang selama ini tidak mendapatkan manfaat dari integrasi ke dalam ekonomi global. OECD mendorong agar Kosta Rika menciptakan kondisi yang tepat bagi perusahaan domestik untuk berkembang.

e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. OECD mendorong agar Kosta Rika meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan sosial.

   Kosta Rika telah mengalokasikan lebih dari 6,5% dari PDB untuk pendidikan dan pelatihan, termasuk yang terbesar di antara negara-negara OECD. Namun, Kosta Rika masih dihadapkan pada tantangan karena banyaknya warga yang meninggalkan sekolah lebih awal tanpa keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan formal.

f. Transformasi industri. Kosta Rika melakukan transformasi industri yang semula bergantung pada pisang mulai mengembangkan manufaktur dan jasa.[35]

4.1.2 Kolombia

Accession roadmap Kolombia diadopsi tanggal 19 September 2013. Pada tahun 2018 anggota OECD secara formal menyampaikan undangan bagi Kolombia untuk bergabung dengan OECD. Kolombia resmi bergabung dengan OECD pada tanggal 28 April 2020.[36] Selama proses aksesi, komite substantif OECD melakukan kajian teknis terhadap Kolombia.[37]

Alasan Kolombia bergabung dengan OECD didorong oleh pembangunan citra baru di bidang politik dan ekonomi. Kolombia pernah mendapat status sebagai 'negara gagal' pada dekade 1990-an, yang disertai dengan konflik kekerasan yang memakan jutaan korban di negara tersebut. Secara umum aksesi Kolombia diharapkan akan mengubah citra Kolombia secara signifikan.

---

[35] Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM), "Setting the Scene for Indonesia's Accession to the OECD."

[36] Kedutaan Besar Republik Indonesia Bogota, "Bahan Masukan Awal Terkait Proses Aksesi Kolombia Ke OECD," October 10, 2023.

[37] OECD, "Colombia's Path Towards OECD Accession," accessed August 21, 2023, https://www.oecd.org/colombia/colombia-accession-to-the-oecd.htm.

Dengan menjadi anggota OECD, Kolombia dapat mengakses mekanisme untuk memantau kualitas kebijakan publik untuk memperkuat upaya di berbagai bidang. Keanggotaan pada OECD dinilai dapat meningkatkan kepercayaan terhadap suatu negara khususnya terkait kebijakan ekonomi seperti menarik investor maupun memperkuat hubungan dengan anggota OECD lain.[38]

Dalam proses aksesi, **Kolombia berhasil melakukan berbagai reformasi** di berbagai bidang, seperti:

a. Ratifikasi *OECD Anti-Bribery Convention* tahun 2013;
b. Membentuk *Colombia Compra Eficiente* sebagai agensi pengadaan publik yang tersentralisasi;
c. Melakukan reformasi di bidang bisnis untuk menjamin perlakuan yang setara antara BUMN dan swasta;
d. Mengakhiri praktik mengisi pimpinan BUMN dengan pejabat pemerintahan eksekutif, terutama dari kalangan menteri.[39]

Namun demikian, proses aksesi Kolombia dihadapkan **sejumlah tantangan dan Kolombia mendapatkan dukungan organisasi internasional untuk reformasi**, seperti:

a. Komite perdagangan OECD tahun 2018 menilai Kolombia belum mampu memperkuat hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk mendorong inovasi. Sebagai latar belakang, masalah HIV/AIDS masih tinggi di Kolombia sehingga pemerintah Kolombia mengizinkan produksi atau impor versi generik obat yang dipatenkan tanpa persetujuan pemegang paten. Secara jangka pendek, kebijakan ini membuat harga obat menjadi terjangkau dan berdampak positif, tetapi secara jangka panjang dianggap melemahkan HAKI utamanya inovasi sektor farmasi.[40]
b. Dalam upaya reformasi pertanahan, sistem kepemilikan lahan informal belum jelas dan dianggap menghambat aktivitas perekonomian. Kolombia memanfaatkan dukungan Bank Dunia dan *Inter-American Development Bank* untuk mempercepat reformasi.
c. Kolombia memanfaatkan bantuan USAID hingga mencapai USD 53 juta selama lima tahun proses aksesi untuk pembenahan beberapa sektor, seperti tata kelola pemerintahan, pembangunan desa, dan resiliensi lingkungan. USAID juga turut membantu Kolombia dalam mempromosikan pelibatan masyarakat madani, akuntabilitas pemerintahan, hingga anti-korupsi.[41]

Terdapat **2 (dua) perubahan signifikan di Kolombia setelah bergabung OECD**:

a. Pengentasan suap di luar negeri dengan implementasi *OECD Anti-Bribery Convention*,

---

[38] Hubert Gehring and Maria Christina Koch, "On the Path from Failed State to OECD Member?: Colombia's Way towards a Brighter Future," in *The Globalisation of Terrorism*, ed. Gerhard Wahlers (Konrad Adenauer Stiftung, 2016), 95–110.
[39] Philip Stevens, "Is the OECD Ready for Colombian Membership?," *Geneva Network*, April 17, 2018, https://geneva-network.com/research/colombia-oecd-accession/.
[40] Stevens.
[41] Sara Danish and Norberto Martinez, "Colombia Joins the OECD—so What?," *Global Americans*, June 18, 2020, https://theglobalamericans.org/2020/06/colombia-joins-the-oecd-so-what/.

i. Kolombia berhasil meningkatkan *law enforcement rate* dalam konteks implementasi konvensi tersebut dari kategori *no implementation* menjadi *limited implementation* dalam laporan *Transparency International's Exporting Corruption* tahun 2020.[42]
ii. Diberlakukan undang-undang baru anti suap: (i) UU No. 2014 Tahun 2019 yang melarang penandatanganan kontrak dengan entitas hukum yang terbukti melakukan *foreign bribery*; dan (ii) UU No. 2013 Tahun 2019 yang menjadi dasar diberlakukannya sejumlah peraturan turunan terkait konflik kepentingan bagi pejabat publik. Kedua UU melengkapi UU No. 1778 tahun 2016 terkait tanggung jawab hukum bagi entitas hukum atas tindakan korupsi transnasional.
iii. Implementasi konvensi yang dipimpin Kementerian Perdagangan berjalan secara perlahan namun konsisten. Pada tahun 2021, 12 dari 34 rekomendasi OECD telah terimplementasi, 12 rekomendasi implementasi secara parsial, dan 9 belum terimplementasi.[43]

b. Reformasi BUMN

Kolombia memiliki 3 (tiga) tujuan utama: (i) memisahkan peran negara sebagai pemilik dan sebagai regulator; (ii) memperkuat independensi direksi BUMN; dan (iii) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen BUMN. Untuk mencapai tujuan, sejumlah langkah telah diambil Kolombia:

i. Mengeluarkan kebijakan jangka panjang oleh *National Planning Department*, yaitu dokumen CONPES 3851 pada 23 November 2015. Dokumen mengonsolidasikan model kepemilikan bagi aset negara yang menjelaskan *corporate governance* yang jelas dan terstruktur sehingga memosisikan negara sebagai pemilik aset yang aktif, terinformasi, serta efisien.
ii. Memperkuat direksi BUMN dengan *guidelines* yang jelas dalam pemilihan anggota direksi serta monitoring dan evaluasi hasil kinerja.
iii. Pada tahun 2018 direksi BUMN di Kolombia tidak lagi diberikan kepada pejabat publik, seperti Menteri.
iv. Kerangka manajemen dan koordinasi aset publik disusun oleh Kementerian Keuangan sebagai langkah awal dibentuknya *holding company* bagi BUMN. Saat ini telah terbentuk Bicentennial Group (membawahi BUMN bidang keuangan) serta Ecopetrol Group (membawahi BUMN bidang energi).[44]

4.1.3 Lithuania

Proses aksesi Lithuania relatif cepat apabila dihitung dari adopsi *accession roadmap* (2015) hingga menjadi anggota penuh (2018). Namun, proses Lithuania sebetulnya lebih panjang yaitu sejak tahun 1996 ketika Lithuania, Estonia, dan Latvia bersama-sama meminta Dewan OECD untuk membentuk Program Regional Baltik OECD.

---

[42] Terdapat 4 (empat) kategori dalam laporan tersebut, yaitu *"no implementation"*, *"limited implementation", "moderate implementation",* dan "*active implementation*".
[43] Kedutaan Besar Republik Indonesia Bogota, "Bahan Masukan Awal Terkait Proses Aksesi Kolombia Ke OECD."
[44] Kedutaan Besar Republik Indonesia Bogota.

Pada tahun 2000 Lithuania menyatakan keinginan untuk menjadi anggota OECD dan tahun 2012 Lithuania kembali memperbarui aplikasi keanggotaan secara resmi. Namun demikian, OECD baru dapat memproses pada tahun 2015 sebagai implementasi dari Resolusi Dewan OECD mengenai Penguatan Jangkauan Global OECD tahun 2013.[45]

Sejak proses aksesi Lithuania dimulai, keanggotaan OECD dijadikan sebagai prioritas kebijakan sehingga didukung oleh seluruh partai politik dan *stakeholders* di Lithuania. Proses aksesi cepat Lithuania juga tidak terlepas dari koordinasi erat, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta diseminasi informasi yang intens antar institusi yang ada di Lithuania. Komunikasi yang kontinu dan aktif dengan Sekretariat OECD terus dilakukan untuk memastikan koordinasi proses aksesi berjalan efektif.[46]

Selama proses aksesi, Lithuania telah **mengadopsi 50 perubahan hukum dan menerapkan berbagai reformasi**. Lithuania ditinjau oleh 21 Komite OECD yang bersifat substansial di berbagai bidang, seperti investasi, suap dalam transaksi bisnis internasional, tata kelola perusahaan, pasar keuangan, asuransi dan dana pensiun swasta, persaingan, pajak, lingkungan, bahan kimia, tata kelola publik, kebijakan regulasi, statistik, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, tenaga kerja dan urusan sosial, kesehatan, perdagangan, kredit ekspor, perikanan, sains dan teknologi, kebijakan ekonomi digital, dan kebijakan konsumen.[47]

Salah satu reformasi signifikan yang dilakukan selama proses aksesi adalah pada **sektor BUMN di Lithuania**. Lithuania mencoba meningkatkan tata kelola, meningkatkan efisiensi dan transparansi, mendorong depolitisasi manajemen, meningkatkan jumlah direksi independen, dan mendorong konsolidasi BUMN.

Reformasi juga telah dilakukan terhadap **rezim investasi**. Lithuania melakukan liberalisasi yang memberi manfaat kepada seluruh anggota OECD, membuka pasar mereka kepada perpindahan modal internasional, dan meningkatkan penanaman modal asing (FDI).[48]

Dengan berbagai reformasi ini, **hasil utama yang dicapai Lithuania**, antara lain, meningkatkan independensi BUMN, menerapkan standar pelaporan keuangan internasional, rasionalisasi sektor-sektor dengan banyak BUMN, meningkatkan tingkat sanksi terhadap suap, dan mengadopsi undang-undang perlindungan pelapor.[49]

Lithuania juga dapat mengambil **manfaat dari survei ekonomi mendalam yang disiapkan OECD** setiap dua tahun yang dapat membantu negara anggota untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kemiskinan, kesenjangan, digitalisasi, dan lain

---

[45] Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, "OECD," 2023, https://urm.lt/default/en/economic-diplomacy/lithuania-and-the-international-economic-organizations/oecd.

[46] Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen, "Bahan Masukan Dari Kementerian Luar Negeri Lithuania," October 3, 2023.

[47] Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, "OECD."

[48] Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen, "Bahan Masukan Dari Kementerian Luar Negeri Lithuania."

[49] Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, "OECD."

sebagainya. Anggota OECD juga dapat secara khusus meminta reviu dan rekomendasi kebijakan pada area-area tertentu yang ingin ditingkatkan oleh pemerintah.[50]

Selain itu, Lithuania telah menyesuaikan **manufaktur dari bekas Uni Soviet menjadi sesuai dengan standar Barat**.[51] Secara geopolitik, dengan bergabung pada OECD, Lithuania juga sejalan dengan kepentingan mereka di Uni Eropa. Prinsip dan nilai OECD dipandang melengkapi keanggotaan Uni Eropa mereka.[52]

4.1.4 Data Tata Kelola Pemerintahan dan Makroekonomi

Negara anggota OECD memiliki karakteristik berupa negara demokrasi yang melaksanakan aturan perundang-undangan, melindungi hak asasi manusia, serta menjalankan ekonomi yang terbuka, transparan, dan pasar bebas.

Berbagai indikator berikut dapat membantu menggambarkan apakah ada korelasi antara peningkatan pada aspek-aspek terkait dengan bergabung menjadi anggota OECD. **Indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran awal** seberapa mampu negara-negara yang baru bergabung dapat menyerap **manfaat bergabung dengan OECD**. Dalam hal ini, telah dilakukan analisa beberapa indikator berikut terhadap **Kosta Rika, Lithuania, dan Kolombia**.

a. **Komitmen Tinggi Terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Democracy Index: Pada periode 2012-2022, **ketiga negara mengalami peningkatan dalam demokrasi**. Skor Kosta Rika naik dari 8,10 ke 8,29; Lithuania naik dari 7,24 ke 7,31; dan Kolombia dari 6,63 ke 6,72. Namun, tren demokrasi Lithuania dan Kolombia justru mengalami tren penurunan sejak bergabung dengan OECD, yaitu pada tahun 2018 dan 2020 masing-masingnya.

[50] Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen, "Bahan Masukan Dari Kementerian Luar Negeri Lithuania."
[51] Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM), "Setting the Scene for Indonesia's Accession to the OECD."
[52] Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen, "Bahan Masukan Dari Kementerian Luar Negeri Lithuania."

Grafik 1 Tren Indeks Demokrasi Tiga Negara Anggota Terbaru OECD dibagi dalam Periode Waktu Pra-Aksesi, Aksesi, dan Pasca-Aksesi

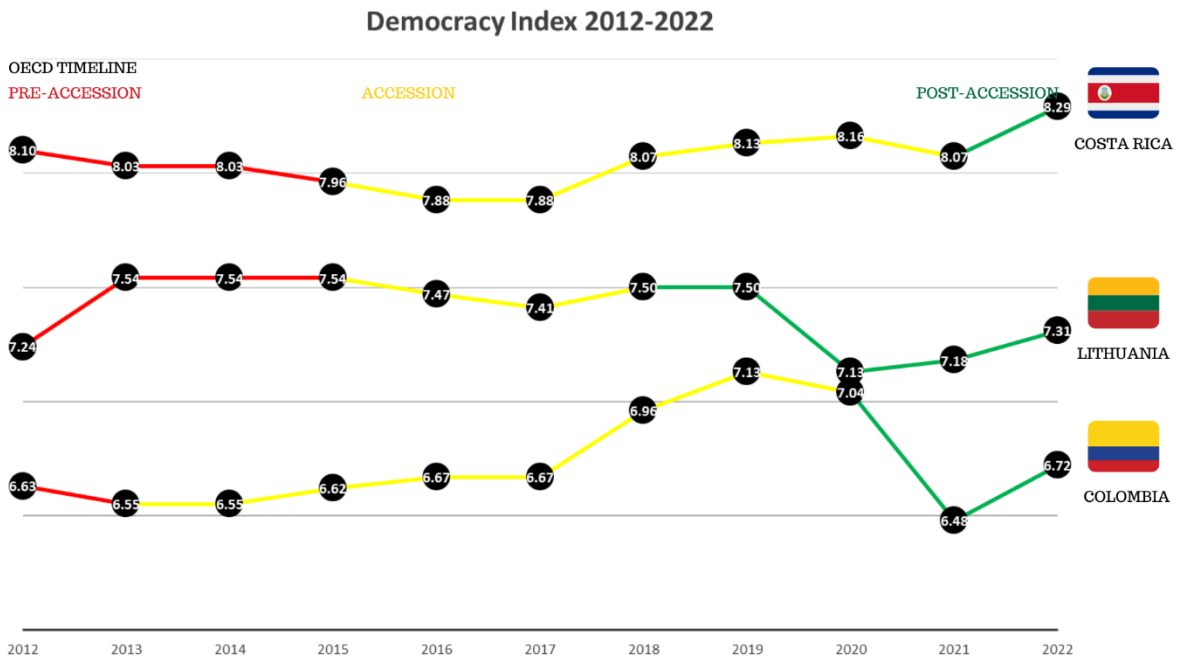

Sumber: The Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2022*, diolah tim Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kemlu RI

b. **Komitmen Terhadap Tata Kelola Pemerintahan**

Worldwide Governance Indicators (WGI): Data Bank Dunia untuk mengukur *Worldwide Governance Indicators* mengukur tata kelola pemerintahan suatu negara dengan 6 (enam) ukuran yaitu: *voice and accountability* (VA), *political stability and absence of violence/terrorism* (PV), *government effectiveness* (GE), *regulatory quality* (RQ), *rule of law* (RL), dan *control of corruption* (CC).[53]

Secara umum, bagi **Kosta Rika** bergabung dengan OECD tampak tidak memberikan perubahan signifikan terhadap skor WGI Kosta Rika. Bahkan dibandingkan dengan pra-aksesi, skor WGI hampir pada semua indikator pada pasca-aksesi cenderung menurun. Hanya faktor stabilitas politik (PV) yang menunjukkan peningkatan.

Pada **Kolombia**, indikator akuntabilitas (VA) dan stabilitas politik (PV) menunjukkan peningkatan signifikan. Untuk indikator lain cenderung menurun. Penerapan peraturan

[53] VA: persepsi sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintah mereka, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan bermedia; PV: persepsi stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan bermotif politik, termasuk terorisme; GE: persepti kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil, derajat independensi pelayanan publik dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut; RQ: persepsi kemampuan pemerintah untuk menghasilkan dan mengimplementasikan kebijakan yang mempromosikan pengembangan sektor swasta; RL: persepsi sejauh mana agen-agen memiliki keyakinan dan patuh pada aturan dalam masyarakat, khususnya dalam hal penegakkan kontrak, hak milik, kepolisian, dan pengadilan; CC: persepsi sejauh mana kekuasaan publik tidak digunakan untuk keuntungan pribadi, korupsi kecil dan besar, serta perebutan negara oleh elit dan kepentingan swasta.

perundang-undangan (RL) pasca-aksesi di Kolombia terus mengalami peningkatan, sebaliknya pengendalian korupsi (CC) justru terus menurun atau kasus korupsi di Kolombia malah meningkat pasca-aksesi.

Berbeda dengan dua negara sebelumnya, **Lithuania** mampu menunjukkan peningkatan WGI hampir di semua indikator. Hanya pada indikator stabilitas politik (PV) yang cenderung dinamis.

Grafik 2 *Worldwide Governance Indicators* Kosta Rika (2012-2022) Dibagi per Periode Pra-Aksesi (Merah), Aksesi (Kuning), dan Pasca-Aksesi (Hijau)

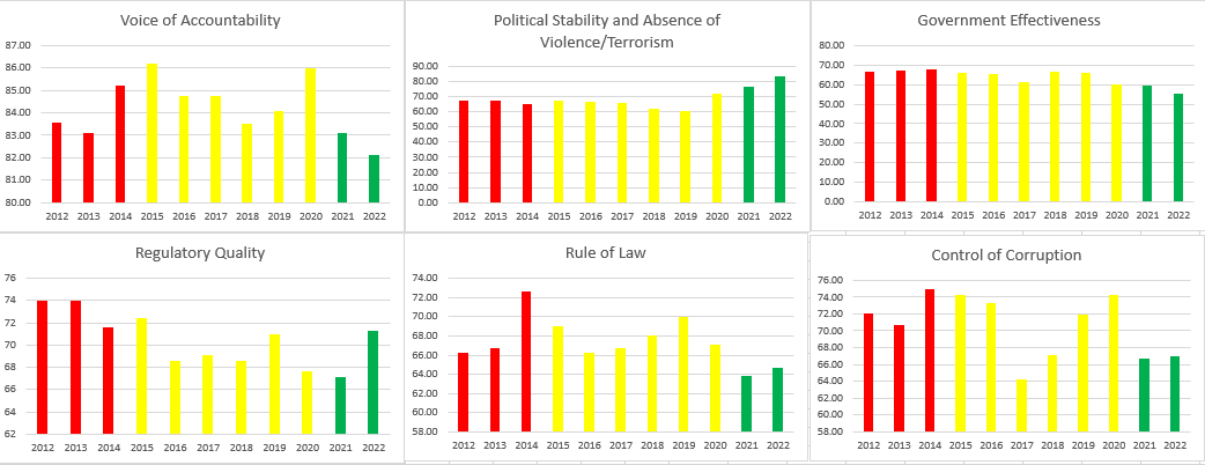

Sumber: Bank Dunia 2023, diolah tim Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kemlu RI.

Grafik 3 *Worldwide Governance Indicators* Kolombia (2012-2022) Dibagi per Periode Pra-Aksesi (Merah), Aksesi (Kuning), dan Pasca-Aksesi (Hijau)

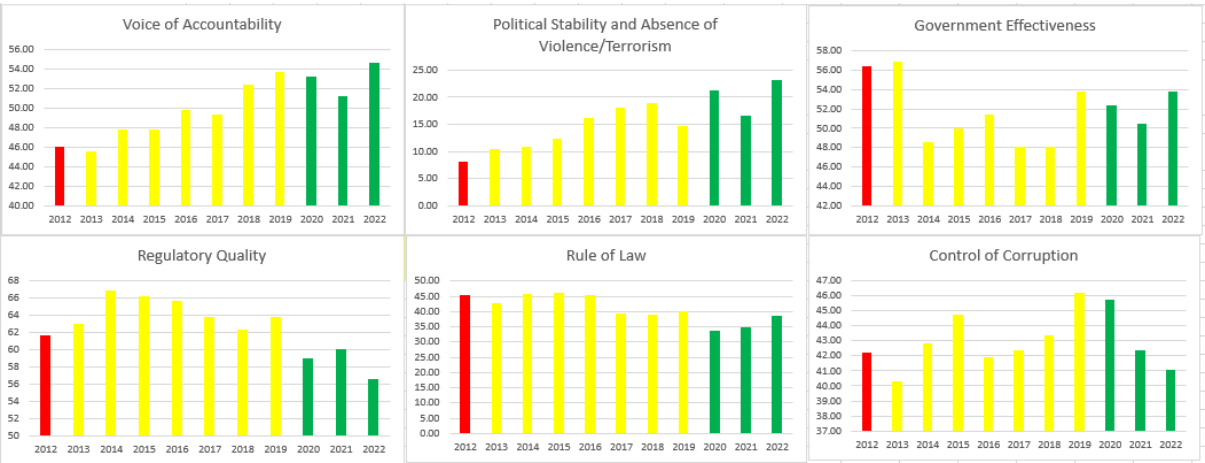

Sumber: Bank Dunia 2023, diolah tim Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kemlu RI.

Grafik 4 *Worldwide Governance Indicators* Lithuania (2012-2022) Dibagi per Periode Pra-Aksesi (Merah), Aksesi (Kuning), dan Pasca-Aksesi (Hijau)

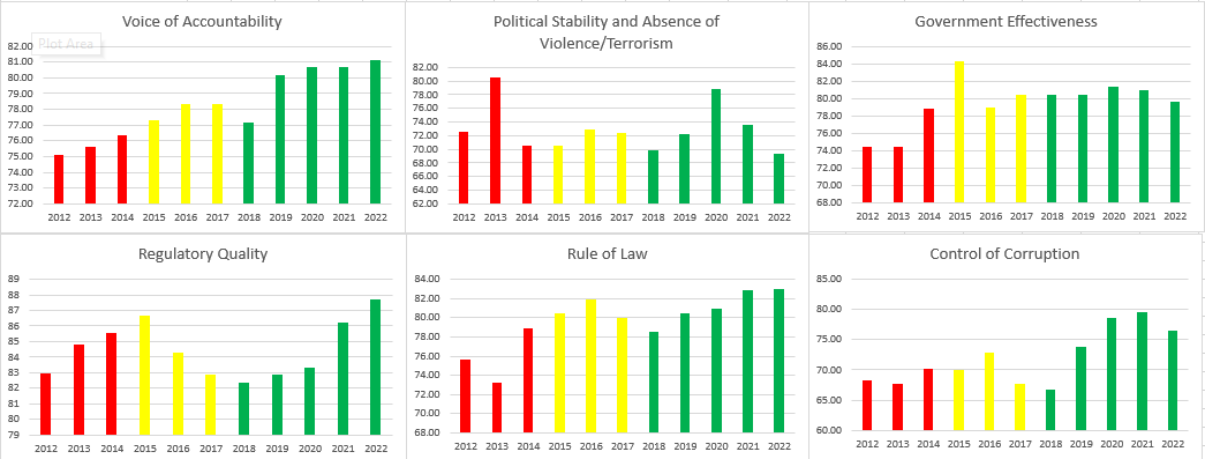

Sumber: Bank Dunia 2023, diolah tim Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kemlu RI.

c. **Komitmen Terhadap Anti-Korupsi**

Corruption Perceptions Index: Pada perubahan indeks persepsi korupsi ketiga negara, **tampak terjadi peningkatan skor pada masing-masing negara** ketika mulai mengimplementasikan *Accession Roadmap*. Meskipun skor Kosta Rika menurun justru setelah bergabung dengan OECD, Kolombia dan Lithuania terus menunjukkan tren peningkatan.

Grafik 5 Perubahan Skor *Corruption Perception Index* Kosta Rika, Kolombia, dan Lithuania Periode 2012-2022

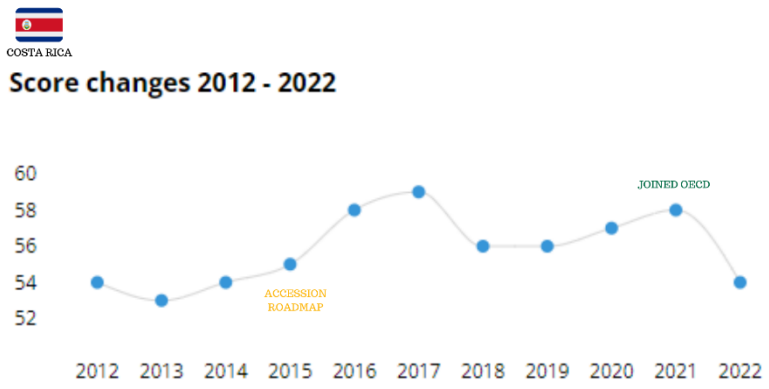

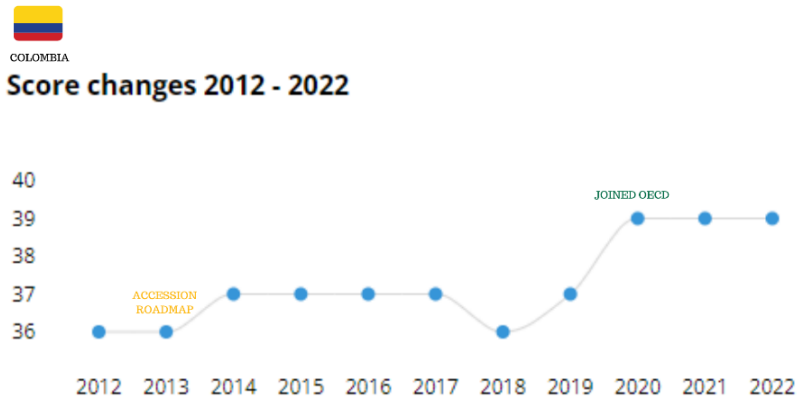

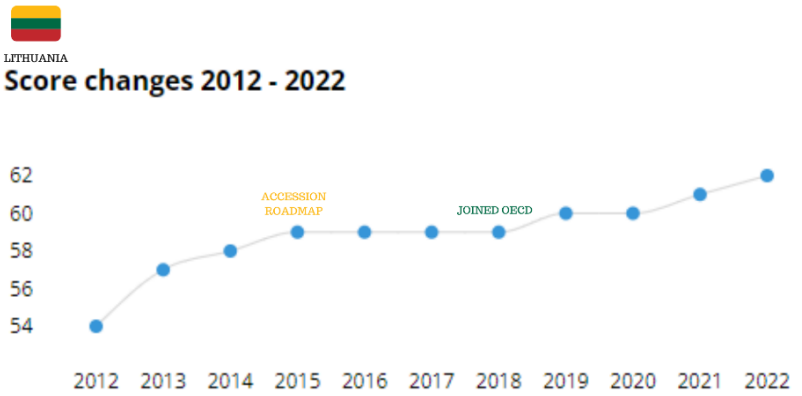

Sumber: Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2022*, diolah tim Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kemlu RI

d. **Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi Pasar yang Terbuka dan Transparan**

Index of Economic Freedom: Indeks ini mengukur tingkat keterbukaan ekonomi suatu negara yang diukur melalui beberapa indikator yaitu: *property rights, government integrity, judicial effectiveness, tax burden, government spending, fiscal health, business freedom, labor freedom, monetary freedom, trade freedom, investment freedom*, dan *financial freedom*.

Berdasarkan *time frame* dari indeks kebebasan ekonomi tersebut, ketiga negara yang baru bergabung dengan OECD **belum cukup berhasil menerapkan ekonomi yang terbuka**. Meskipun selama masa aksesi tampak ada kenaikan, tetapi setelah bergabung dengan OECD, Lithuania dan Kolombia mengalami tren penurunan. Sebaliknya, Kosta Rika yang mengalami penurunan skor keterbukaan ekonomi selama masa aksesi, justru meningkat setelah bergabung dengan OECD.

Grafik 6 Perubahan Skor Indeks Kebebasan Ekonomi Kosta Rika, Kolombia, dan Lithuania 2012 - 2023

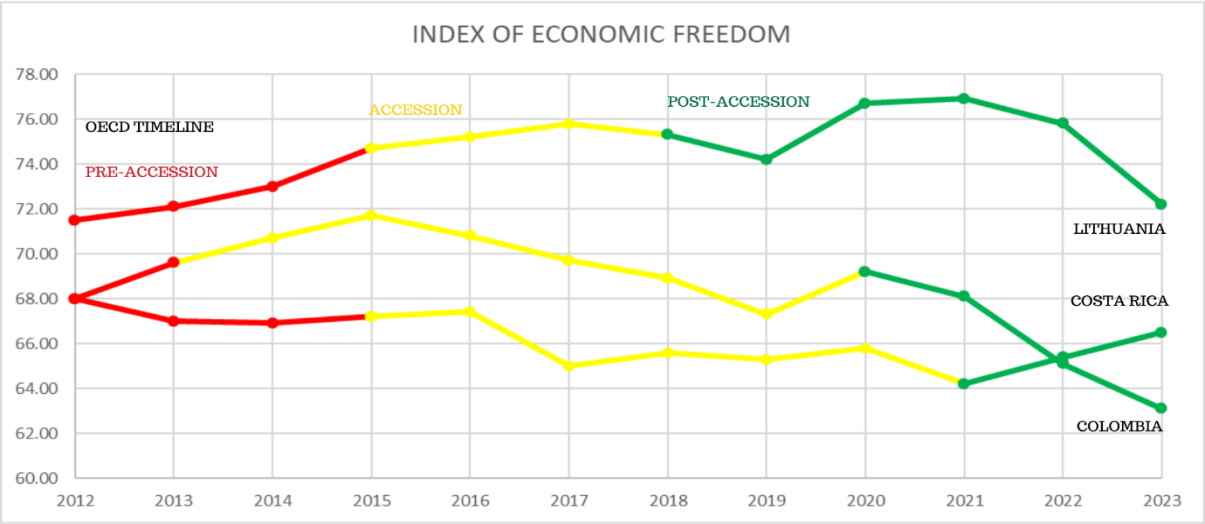

Sumber: *Index of Economic Freedom 2023*, diolah tim Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kemlu RI

e. **Komitmen untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan**

Sustainable Development Report: **Ketiga negara yang bergabung dengan OECD menunjukkan peningkatan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**. Peningkatan signifikan dialami Kolombia, dari 66,90 pada tahun 2013 ketika Kolombia memasuki masa aksesi atau mulai diadopsinya *Accession Roadmap* meningkat menjadi 70,34 menjelang diterimanya Kolombia menjadi anggota.

Grafik 7 Skor Capaian Tujuan Berkelanjutan Lithuania, Kolombia, dan Kosta Rika Selama Masa Pra-Aksesi, Aksesi, dan Pasca-Aksesi ke OECD

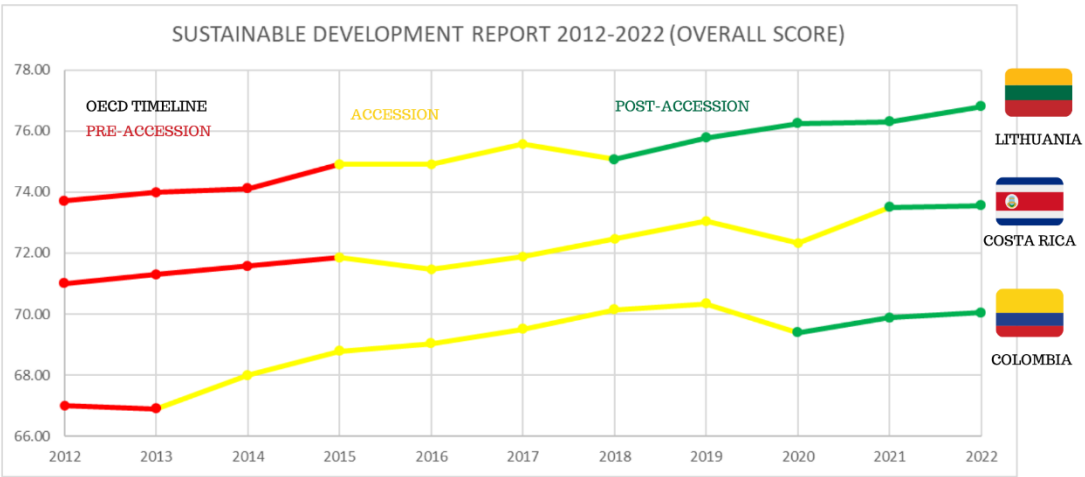

Sumber: Sustainable Development Goals Index *2023*, diolah tim Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kemlu RI

Manfaat atau dampak keanggotaan OECD terhadap negara-negara yang baru bergabung juga dapat ditinjau dari data makroekonomi.

a. **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan**: GNI per kapita ketiga negara cenderung menurun selama proses aksesi. Penurunan ini juga berkorelasi dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja di masing-masing negara, kecuali Lithuania. Terkait hal ini, perlu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai agar juga dapat mendorong peningkatan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

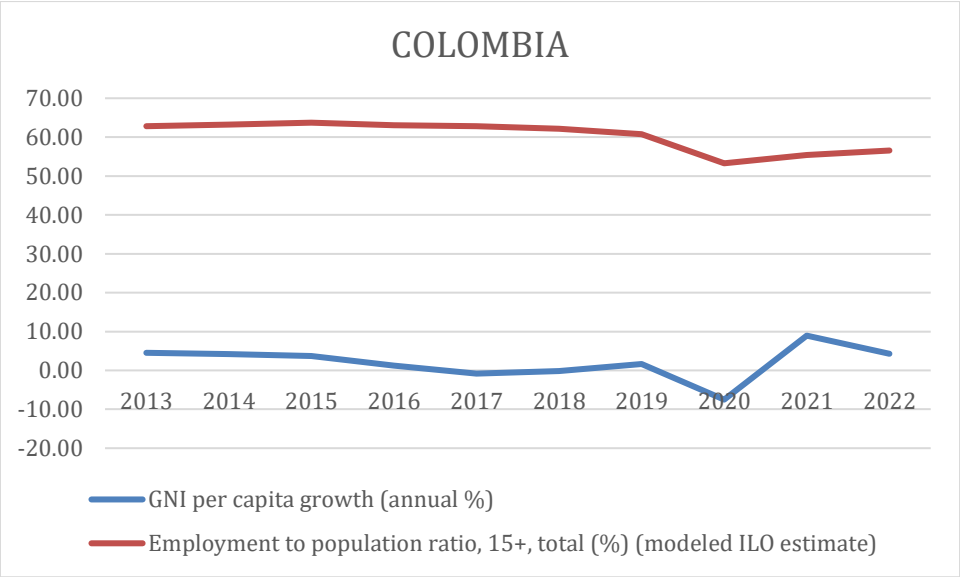

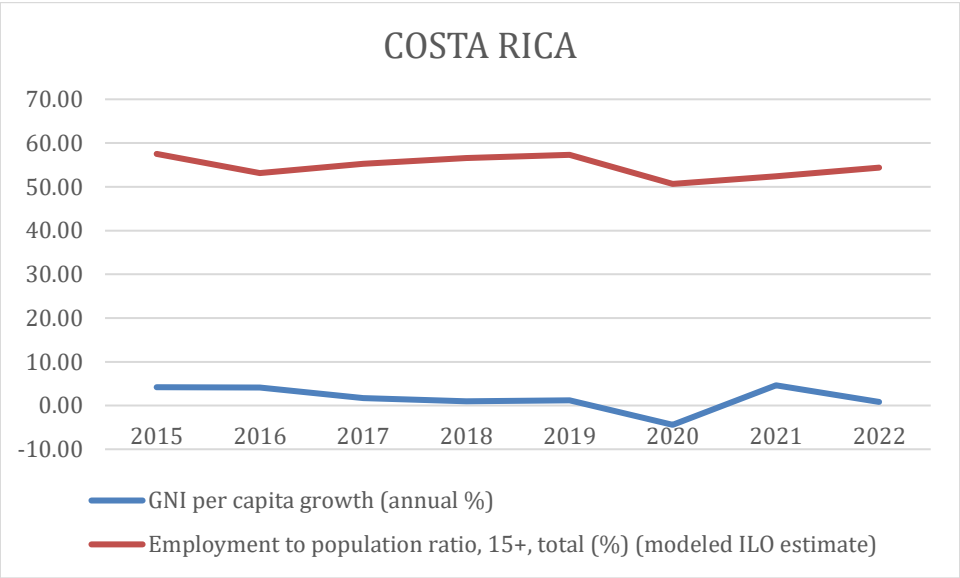

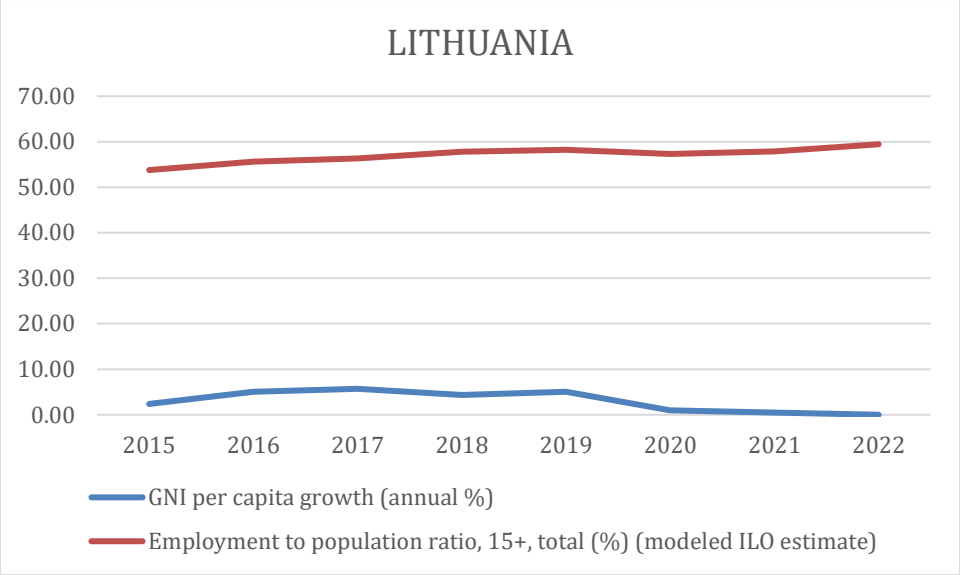

Sumber: Data World Bank *2023*, diolah tim Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kemlu RI

b. **Hutang pemerintah, investasi asing langsung, dan emisi CO2**: Salah satu ukuran dan manfaat keberhasilan menjadi anggota OECD adalah adanya penurunan persentase utang pemerintah terhadap PDB dengan mendorong negara untuk melakukan pengoptimalan pendapatan negara melalui pajak dan efisiensi belanja negara. Data berikut menunjukkan adanya tren peningkatan utang pemerintah Lithuania dan Kolombia, meski terjadi penurunan sejak 2020. Dengan meningkatnya utang pemerintah, kedua negara juga belum mampu memaksimalkan peluang untuk meningkatkan investasi langsung. Emisi CO2 negara-negara selama proses aksesi juga cenderung meningkat, terutama bagi Lithuania. Sementara Kosta Rika dan Kolombia trennya menurun dalam beberapa tahun terakhir kendati belum signifikan.

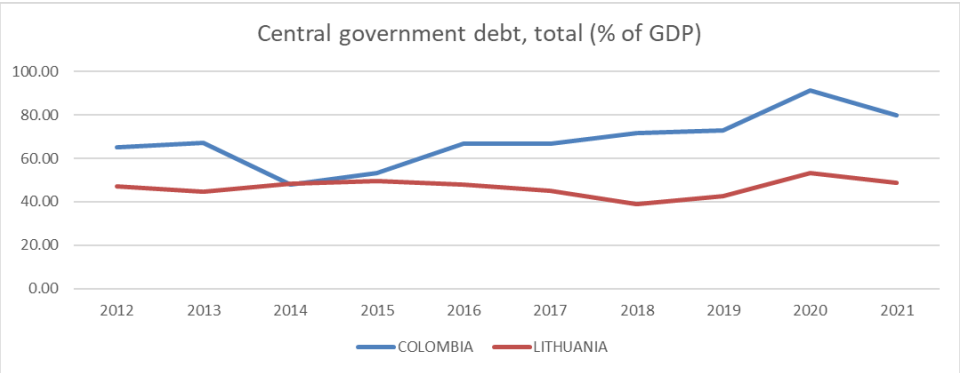

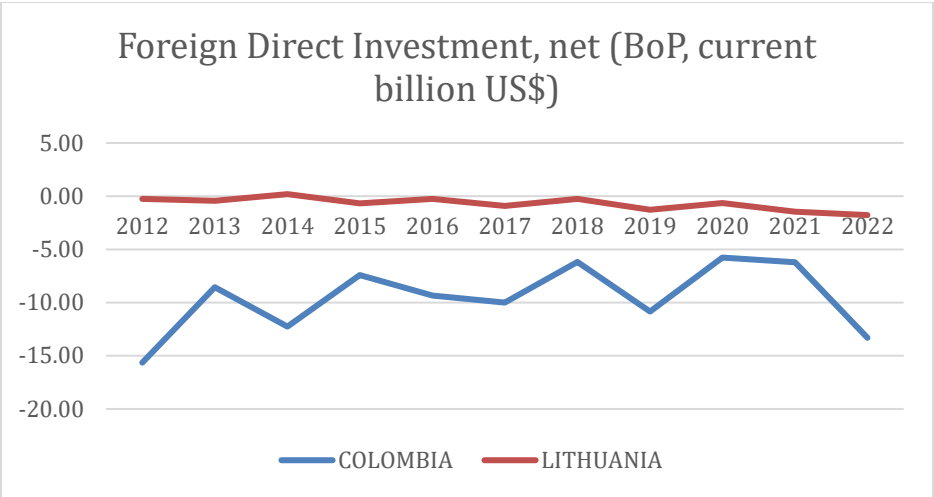

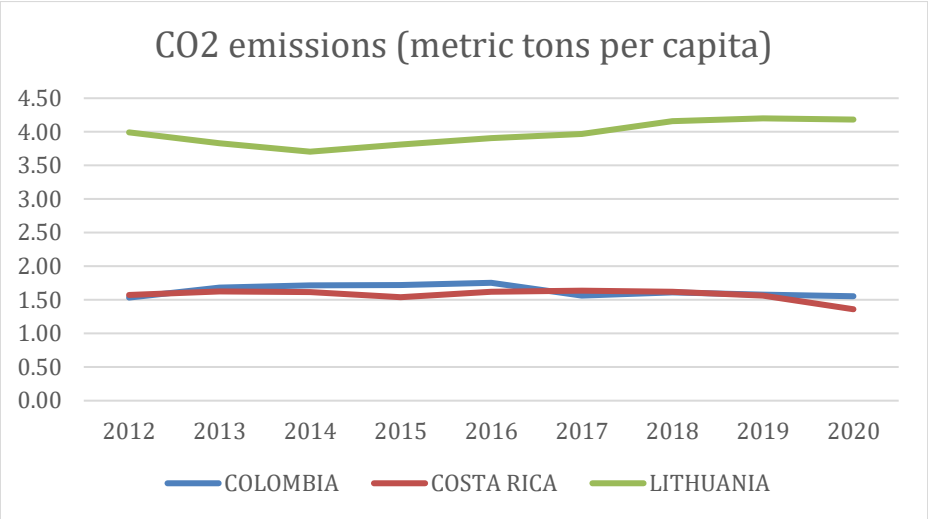

Sumber: Data World Bank *2023*, diolah tim Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kemlu RI

c. **Ekspor, Ketidaksetaraan Pendapatan, dan Kemiskinan**: Selama proses aksesi, neraca perdagangan Kolombia terus negatif dan cenderung menurun. Sementara ekspor Kosta Rika perlahan naik meski tidak signifikan. Ekspor Lithuania meningkat setelah bergabung dengan OECD, tetapi kembali menurun pasca-pandemi COVID-19.

   Peningkatan ekspor yang tidak signifikan ini berkorelasi dengan masalah ketimpangan yang masih sulit diturunkan, terlihat dari indeks gini yang justru semakin tinggi ketika negara-negara dalam proses aksesi. Namun, tren persentase masyarakat miskin (pendapatan di bawah USD 2,15 per hari) cenderung menurun dari ketiga negara selama proses aksesi, meskipun kembali melonjak ketika terjadi pandemi COVID-19.

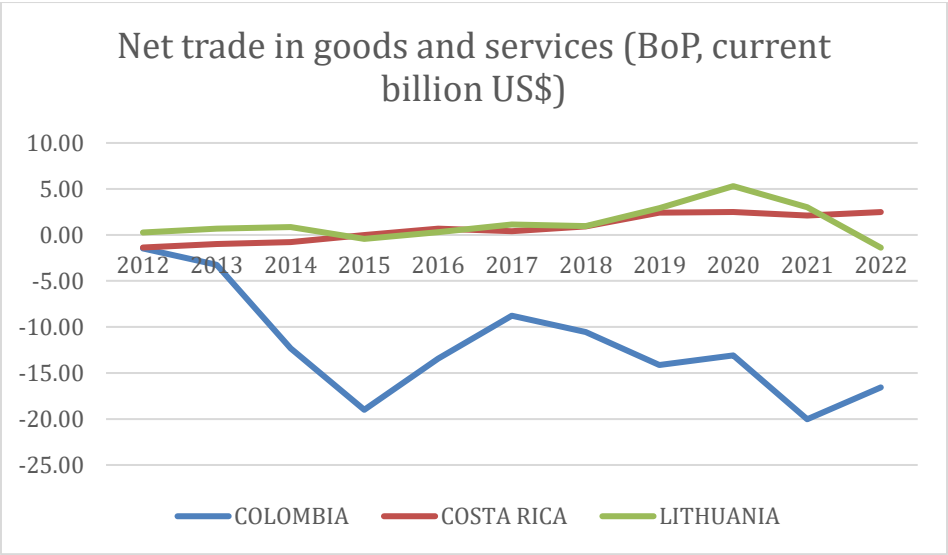

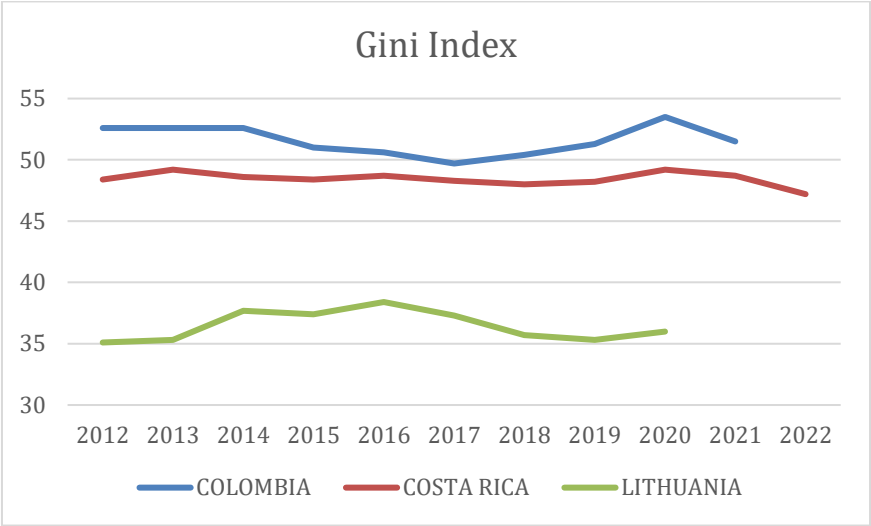

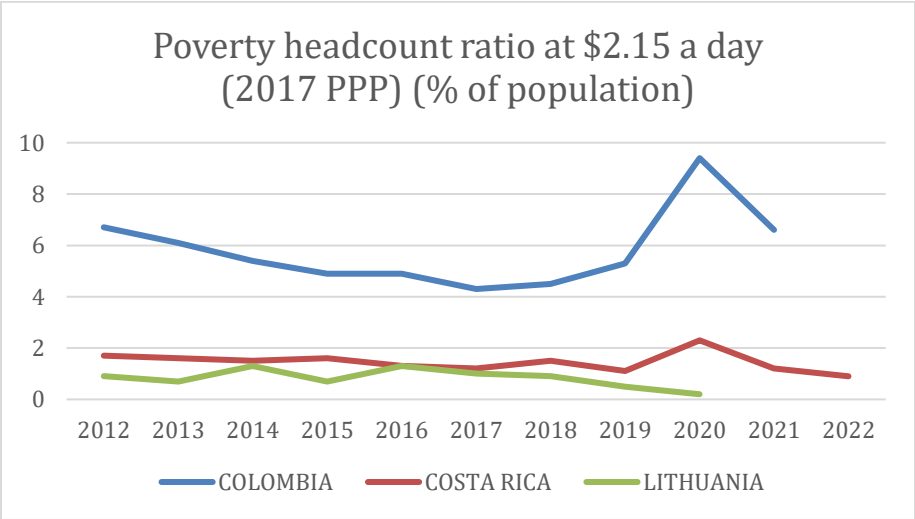

Sumber: Data World Bank *2023*, diolah tim Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kemlu RI

4.2 Negara Kandidat OECD

Pada tahun 2022 Dewan OECD membuka diskusi aksesi dengan 6 (enam) kandidat anggota, yaitu Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania. Dewan OECD juga telah mengadopsi *Accession Roadmap* untuk Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania.[54]

Studi ini meninjau perlunya mengetahui pelajaran dan praktik terbaik tidak saja dari negara-negara yang sudah bergabung dengan OECD, tetapi juga negara-negara kandidat. Pembahasan ini mengambil Argentina dan Brazil sebagai contoh negara kandidat untuk diketahui motivasi dan tantangan yang dihadapi keduanya selama proses bergabung dengan OECD.

4.2.1 Argentina

Proses aksesi Argentina dimulai pada tahun 2016 ketika Pemerintah Argentina di bawah Presiden Mauricio Macri menyampaikan *expression of interests* secara tertulis. Namun, **proses aksesi terkendala karena tidak adanya kontinuitas keinginan politik**.

Pada Pilpres 27 Oktober 2019, Mauricio Macri memperoleh 40,28% suara, kalah dari rivalnya dari koalisi sayap kiri, Alberto Fernandez, dengan raihan 48,24% suara. Rivalitas membuat banyak kebijakan Macri dibatalkan pada masa pemerintahan Fernandez.[55] Proses aksesi ke OECD yang semula diajukan awalnya tetap dilanjutkan.

Pada tanggal 25 Januari 2022, Sekjen OECD Mathias Cormann menyampaikan surat undangan kepada Presiden Alberto Fernandez. Surat itu meminta konfirmasi kepatuhan Argentina terhadap dua dokumen: *the 60th Anniversary New Vision Statement* dan *the 2021 Ministerial Council Statement*. Kedua dokumen mengandung *shared values*, visi dan prioritas OECD yang telah diadopsi oleh seluruh anggota OECD.[56]

Namun, Pemerintah Argentina memandang bahwa Argentina sedang tidak dalam kondisi untuk mendukung reformasi besar-besaran yang mengarah pada liberalisasi kebijakan ekonomi. Tekanan politik juga datang dari Wakil Presiden Cristina Fernandez Kirchner untuk menolak undangan OECD dikarenakan terdapat beberapa *conditions* atas kebijakan ekonomi Argentina.[57]

Argentina dihadapkan dengan berbagai **tantangan yang kompleks** ketika diajukan untuk menjadi anggota OECD. Perekonomian Argentina sedang mengalami krisis sejak tahun 2018. Inflasi mencapai 51%.[58] Tingkat persaingan di banyak sektor masih rendah. Harga konsumen lebih tinggi dibanding dengan standar internasional. Investasi asing langsung

---

[54] OECD, "Accession to the Organisation."
[55] Kedutaan Besar Republik Indonesia Buenos Aires, "Penyampaian Masukan Untuk Reviu Kebijakan Aksesi Indonesia Ke OECD," October 2, 2023.
[56] OECD, "Letter to H.E. Mr. Alberto Fernandez," 2022, https://www.oecd.org/newsroom/Letter-to-H-E-Mr-Alberto-Fernandez-President-Argentina.pdf.
[57] Eldia, "Con Una Carta, El Gobierno Le Puso Reparos a La OCDE," April 17, 2022, https://www.eldia.com/nota/2022-4-17-13-4-0-con-una-carta-el-gobierno-le-puso-reparos-a-la-ocde-tras-invitacion-para-ingresar-al-selecto-organismo-politica-y-economia.
[58] Americas Quarterly, "OECD: Still a Long Road Ahead for Argentina, Brazil and Peru," 2022, https://www.americasquarterly.org/article/oecd-still-a-long-road-ahead-for-argentina-brazil-and-peru/#:~:text=Argentina's application to join the,removal of all capital controls.

juga lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya. Akibatnya kinerja produktivitas Argentina kurang baik sehingga kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih produktif dan berpendapatan lebih tinggi menjadi hilang begitu saja.[59]

Presiden Mauricio Macri memandang bahwa **aksesi ke OECD merupakan prioritas kebijakan utama untuk mengatasi berbagai masalah kelemahan institusional** di Argentina. Terdapat beberapa manfaat yang diidentifikasi: (i) Mencegah perubahan kebijakan secara drastis antara administrasi yang berbeda-beda; (ii) Mengurangi biaya keuangan internasional; (iii) Memfasilitasi harmonisasi norma yang mempromosikan perdagangan dan investasi; (iv) Memberi kesempatan kepada Argentina untuk meningkatkan partisipasi pada agenda pembangunan global; dan (v) Menghasilkan dampak reputasional yang dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengusaha maupun konsumen.[60]

Oleh sebab itu, Argentina ingin lebih terintegrasi dengan ekonomi internasional. Integrasi yang lebih kuat akan meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan Argentina untuk bersaing di pasar luar negeri dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap *input* perantara, barang modal, dan teknologi dalam kondisi persaingan internasional. Hal ini diharapkan akan meningkatkan investasi dan produktivitas, memungkinkan Argentina menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik.[61]

4.2.2 Brazil

Seperti halnya Indonesia, Brazil merupakan *key partner* dari OECD sejak tahun 2007. Brazil telah mengaksesi kemitraan pada badan-badan OECD, menunjukkan kepatuhan pada berbagai instrumen OECD, terintegrasi pada sistem informasi dan pelaporan statistik OECD, mengikuti *peer reviews* pada sektor-sektor spesifik, dan telah diundang pada seluruh pertemuan OECD tingkat Menteri sejak tahun 1999.[62]

Brazil tetap **menghadapi berbagai tantangan selama proses aksesi** yang lebih bersifat ekonomi dibanding politik.

a. Pada tahun 2019 Presiden Bolsonaro telah bertemu dengan Presiden Donald Trump untuk mendapat dukungan AS atas aksesi Brazil ke OECD. Semula sempat ada kekhawatiran dengan naiknya Presiden Jair Bolsonaro yang dipandang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Namun dukungan AS diperoleh dengan syarat/harapan Brazil tidak lagi mendapat perlakuan khusus dengan statusnya sebagai negara berkembang di WTO.

---

[59] OECD, "OECD Economic Surveys: Argentina 2019," 2019, https://www-oecd--ilibrary-org.translate.goog/sites/63518aa6-en/index.html?itemId=%2Fcontent%2Fcomponent%2F63518aa6-en&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
[60] Michael Matera, Pablo Souto, and Silvina Vatnick, "A Preliminary Assessment of Argentina's Accession to the OECD: A Report of the CSIS Americas Program," *CSIS*, April 2019, 2.
[61] OECD, "OECD Economic Surveys: Argentina 2019."
[62] OECD, "The OECD and Brazil: A Mutually Beneficial Relationship," accessed October 17, 2023, https://www.oecd.org/latin-america/countries/brazil/#:~:text=Following Brazil's adherence to the,the terms%2C conditions and process.

b. Tantangan penyelarasan sistem *transfer pricing*[63] Brazil yang menggunakan metode margin tetap dengan sistem OECD yang berdasarkan pasar dengan memperhatikan prinsip harga wajar (*arm's length principle*). Brazil didorong untuk menyesuaikan sistem harga transfer yang sesuai dengan OECD.[64] Guna memenuhi standar OECD mengenai *transfer pricing*, Brazil mengeluarkan UU No. 14.596 pada tanggal 14 Juni 2023 yang akan berlaku pada awal tahun 2024.[65]
c. Brazil juga dihadapkan dengan beberapa area teknis yang ditinjau secara khusus menurut Dewan OECD, yaitu: reformasi struktural, perdagangan dan investasi yang terbuka, pertumbuhan inklusif, tata kelola pemerintahan khususnya di bidang lingkungan, keanekaragaman hayati dan iklim, kemudian digitalisasi dan infrastruktur.[66]
d. Pada bulan Juli 2021, Komite Kebijakan Lingkungan OECD merilis laporan kebijakan lingkungan Brazil sejak 2015 yang memuat kritik kebijakan Brazil yang belum sejalan panduan OECD terutama tingkat deforestasi di negara tersebut masih tinggi. OECD secara khusus mengkritik UU No. 2159/2021 Brazil.[67]

---

[63] *Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam hal menentukan harga transfer suatu transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, maupun finansial baik antardivisi dalam satu perusahaan maupun antara dua perusahaan atau lebih yang memiliki hubungan istimewa. Dengan kebijakan ini, perusahaan dapat mengalihkan penghasilan mereka dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga dapat mengurangi tagihan pajak perusahaan.

[64] Base Firma, "Brazil's Challenge to Becoming a Member of the OECD," June 14, 2019, https://www.internationaltaxreview.com/article/2a69yvx1bb2vzxyrngnwg/brazils-challenge-to-becoming-a-member-of-the-oecd.

[65] EY, "Brazil Transfer Pricing Law Enforceable Beginning 1 January 2024," 2023, https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/brazil-transfer-pricing-law-enforceable-beginning-1-january-2024.

[66] Nicola Bonucci et al., "Brazil's Accession to the OECD – This Is Where the Serious Things Begin," *Paul Hastings*, September 12, 2022, https://www.paulhastings.com/en-GB/insights/client-alerts/brazils-accession-to-the-oecd-this-is-where-the-serious-things-begin.

[67] Conectas, "OECD Report Shows Environmental Challenges for Brazil to Join the Organization," December 16, 2021, https://www.conectas.org/en/noticias/oecd-report-shows-environmental-challenges-for-brazil-to-join-the-organization/.

5 ANALISIS KEBIJAKAN STRATEGIS AKSESI INDONESIA KE OECD

5.1 ASPEK GEOPOLITIK DAN GEOEKONOMI

Dalam menganalisis kebijakan strategis terkait aksesi Indonesia ke OECD, penting untuk memahami 2 (dua) aspek kunci, yaitu geopolitik dan geoekonomi.

Di satu sisi, aspek geopolitik melibatkan analisis hubungan kekuatan politik antara Indonesia dan negara-negara anggota OECD, serta dampaknya terhadap kebijakan strategis yang akan diimplementasikan. Hal ini termasuk evaluasi posisi Indonesia sebagai anggota OECD *vis-à-vis* posisi Indonesia dalam berbagai kelompok dan forum internasional (seperti G77, MIKTA, G7, G20 dan ASEAN) serta rivalitas Amerika Serikat dan RRT.

Di sisi lain, aspek geoekonomi mencakup analisis dampak ekonomi yang mungkin timbul dari keanggotaan Indonesia di OECD. Keterlibatan dalam organisasi ini dapat membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi Indonesia, termasuk dalam hal regulasi perdagangan, investasi asing, dan adaptasi terhadap standar internasional, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam merumuskan kebijakan strategis.

5.1.1 Konsisten Menjalankan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Apabila Indonesia menjadi anggota penuh OECD, **Indonesia tetap dapat menjalankan politik luar negeri bebas aktif** dan hal ini bukan menjadi penghalang bagi Indonesia untuk menjalin kemitraan dengan berbagai negara dan kelompok negara di dunia.

OECD bukan kelompok atau koalisi negosiasi di mana para anggota harus menyepakati posisi bersama dalam suatu negosiasi. Namun demikian, OECD atau negara anggota OECD sering kali memajukan standar OECD di berbagai forum internasional dan anggota OECD tidak dapat menolak standar yang ditetapkan OECD.

Dalam hal ini, Indonesia tetap dapat memainkan **peran kepemimpinan berbagai kelompok di forum internasional**, seperti G77, Gerakan Non-Blok (GNB), MIKTA, OKI, G20, ASEAN, APEC, dan kelompok/forum lainnya. Namun demikian, apabila Indonesia menjadi anggota penuh OECD, sulit untuk menolak standar yang telah ditetapkan OECD di berbagai forum internasional.

Dalam **konteks rivalitas kekuatan dunia** – tren bipolaritas Amerika Serikat versus China – Indonesia tetap dapat menjalin kerja sama dengan negara-negara Barat dan negara-negara yang dipandang berseberangan dengan negara-negara Barat, seperti China dan Rusia.

Indonesia tetap aktif bekerja sama dengan Amerika Serikat melalui *Indo Pacific Economic Framework* (IPEF) dan RRT melalui *Global Development Initiative* (GDI). Dalam kaitan ini, kepentingan nasional Indonesia tetap menjadi tolak ukur utama sesuai dengan nilai yang sudah ada dalam kerangka *ASEAN Outlook on Indo Pacific* (AOIP).

Selain itu, walaupun tidak bergabung dalam BRICS, Indonesia terus mengamati dengan seksama perkembangan forum kerja sama ini. Partisipasi Indonesia pada BRICS juga merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif sesuai mandat UUD 1945. Presiden RI hadir di KTT BRICS ke-15 di Afrika Selatan pada Agustus 2023. Indonesia konsisten menyuarakan pentingnya negara-negara berkembang bersatu untuk memperjuangkan hak-hak bersama, termasuk menyoroti ketidakadilan dalam tatanan perekonomian dunia yang meningkatkan kesenjangan pembangunan ekonomi antara negara berkembang dan negara lainnya.

Profil dan peran Indonesia **di kawasan Asia Tenggara** dapat meningkatkan daya tawar politik, sebagaimana Indonesia adalah satu-satunya negara anggota G20 di Asia Tenggara, Indonesia dapat menjadi satu-satunya anggota penuh OECD di ASEAN.

5.1.2 Memainkan Peran *Bridge Builder*

Di berbagai forum internasional, Indonesia memainkan peran sebagai *bridge builder* untuk menghubungkan kepentingan negara maju dan berkembang dan/atau rivalitas antar kekuatan dunia. Keanggotaan Indonesia di OECD dapat memicu pertanyaan, misalnya, bagaimana keanggotaan Indonesia di OECD yang dianggap sebagai klub negara maju dapat diseimbangkan dengan kepentingan negara berkembang.

Dengan perluasan keanggotaan OECD dewasa ini, terdapat beberapa negara berkembang dalam kategori *upper-middle income countries*, seperti Kosta Rika, Meksiko, Türkiye, dan Kolombia, yang telah menjadi anggota penuh OECD (walaupun mayoritas anggota OECD tetap *high-income countries*). Sehubungan hal ini, Kolombia dan Kosta Rika tetap menjadi anggota G77 yang merupakan koalisi atau kelompok negosiasi negara berkembang.

Posisi Indonesia sebagai negara berkembang di OECD dapat menjadi kesempatan untuk menyuarakan posisi negara berkembang dan sekaligus memainkan peran *bridge builder* antara negara maju dan berkembang dan/atau rivalitas antar kekuatan dunia.

Namun demikian, perlu diantisipasi setelah proses aksesi diperkirakan Indonesia akan melakukan berbagai reformasi untuk menyelaraskan standar OECD, sehingga dapat mengalami kesulitan untuk memajukan kepentingan negara berkembang atau menolak standar OECD yang diusulkan di berbagai forum internasional.

5.1.3 Rekonfigurasi Terbatas Posisi Indonesia di Forum International

Secara umum, posisi Indonesia di forum internasional banyak dikaitkan dengan posisi G77 (koalisi atau kelompok negosiasi negara-negara berkembang di PBB) khususnya dalam negosiasi di PBB untuk isu ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan perubahan iklim. Kepentingan utama G77 adalah menyelamatkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), perubahan iklim, dan memajukan kepentingan negara-negara berkembang.

Apabila bergabung dengan OECD, modalitas perundingan Indonesia di forum multilateral diperkirakan perlu rekonfigurasi terbatas posisi Indonesia. Sebagai catatan, Kosta Rika dan Kolombia masih dapat menyelaraskan dengan posisi G77 walaupun sudah menjadi anggota OECD. Sehubungan hal ini, diperlukan antisipasi kemungkinan rekonfigurasi posisi Indonesia untuk beberapa isu global, antara lain:

a. Isu iklim. Indonesia selama ini memiliki posisi bersama negara berkembang untuk meminta tanggung jawab lebih besar dari negara maju (misalnya, pendanaan perubahan iklim USD 100 miliar per tahun) dan memajukan prinsip *common but differentiated responsibilities and respective capability* (CBDR-RC).

   Negara-negara maju dan OECD cenderung mengklasifikasikan pembagian beban berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi dan hanya memberikan perbedaan *treatment* bagi *Least-Developed Countries* (LDCs) dan *lower income countries*.

   Dalam hal ini, terdapat risiko penambahan beban bagi Indonesia untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

b. Pendanaan pembangunan. Negara-negara maju sulit mencapai posisi bersama dalam hal pendanaan pembangunan. Bahkan ada kecenderungan negara-negara maju untuk menghindari pendanaan pembangunan, misalnya dengan mencari sumber lain seperti optimalisasi pajak dan peningkatan peran swasta. Ini akan menjadi tantangan bagi Indonesia yang sudah memperjuangkan pendanaan pembangunan sejak G20.

c. Gender. Dalam hal ini, G77 sendiri pun dipandang tidak solid, dengan beberapa isu seperti gender dapat menjadi pemecah dalam menyatukan posisi. Isu-isu sensitif ini selalu diangkat Kolombia (anggota OECD) dan Argentina (kandidat OECD).[68]

d. Posisi sebagai negara berkembang. Keanggotaan Indonesia pada OECD juga dinilai akan berdampak pada beberapa perlakuan khusus yang selama ini diperoleh Indonesia dengan statusnya sebagai negara berkembang. Namun demikian, perlu diperhatikan negara-negara maju sudah hanya memberikan *preferential treatment* tidak ke semua negara berkembang, namun difokuskan bagi *Least Developed Countries* (LDCs) dan/atau *low-income countries* (LiCs).

   Dalam hal ini, Indonesia berpotensi kehilangan *special and differentiated treatment* (*S&D treatment*) pada berbagai perundingan perdagangan.[69] Sebagai contoh, dalam kasus Brazil, AS telah meminta agar tidak lagi mendapat perlakuan khusus dengan statusnya sebagai negara berkembang di WTO.[70]

Keperluan atau tidak rekonfigurasi posisi Indonesia diperkirakan akan berkembang seiring dengan proses reformasi domestik untuk berbagai sektor. Ke depan, apabila Indonesia sering kali mengalami kesulitan mencapai posisi bersama dengan negara berkembang di G77, tidak tutup kemungkinan konsekuensi keluar dari G77 (seperti halnya Meksiko).[71]

---

[68] Perwakilan Tetap RI New York, "Penyampaian Pada Focus Group Discussion: Lesson Learned and Best Practices with OECD Members and Candidates," August 2023.
[69] Perwakilan Tetap RI Jenewa, "Penyampaian Pada Focus Group Discussion: Lesson Learned and Best Practices with OECD Members and Candidates," August 2023.
[70] Center for Strategic and International Studies, "Trade Outcomes from the Trump-Bolsonaro Meeting: More than Meets the Eye?," March 20, 2019, https://www.csis.org/analysis/trade-outcomes-trump-bolsonaro-meeting-more-meets-eye.
[71] Perwakilan Tetap RI Jenewa, "Penyampaian Pada Focus Group Discussion: Lesson Learned and Best Practices with OECD Members and Candidates."

5.1.4 Katalis Reformasi Domestik

Proses aksesi Indonesia ke OECD dapat menjadi katalis untuk melakukan reformasi domestik dan akan menjadi sinyal positif kepada pasar dan masyarakat internasional.

Proses reformasi domestik ini dapat digunakan untuk memperoleh dukungan untuk mempercepat reformasi. Negara kandidat dapat memperoleh: (i) akses kepakaran, penelitian, hingga analisis yang tersedia pada OECD; (ii) saling bertukar praktik baik melalui lebih dari 300 komite dan kelompok kerja; (iii) berpartisipasi *peer review* yang berguna untuk peningkatan kebijakan; (iv) akses data dan statistik terkini untuk membantu negara mengidentifikasi dan mengukur berbagai masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi; dan (v) komparasi dan tolak ukur terhadap statistik OECD.

Selain itu, **negara kandidat dapat memperoleh dukungan pendanaan untuk reformasi**. Sebagai contoh, Kolombia berhasil mendapatkan bantuan Bank Dunia, *Inter-American Development Bank*, dan USAID untuk mempercepat proses reformasi. Secara khusus USAID memberikan bantuan sekitar USD 53 juta selama lima tahun proses aksesi untuk pembenahan tata kelola pemerintahan, pembangunan desa, dan resiliensi lingkungan.

5.1.5 Sinyal Positif dan Meningkatkan Daya Tarik untuk Investasi

Sinyal positif komitmen Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 salah satunya melalui peningkatan investasi dan ekspor melalui hilirisasi industri. Proyeksi nilai investasi dalam peta jalan hilirisasi industri Indonesia mencapai USD 545,3 miliar dan ini merupakan peluang yang sangat besar bagi para investor. Indonesia merupakan *land of opportunity* dan diproyeksikan sebagai hub manufaktur masa depan. Percepatan transformasi industri Indonesia akan berkontribusi bagi bangkitnya ekonomi kawasan dan ekonomi global.

Indonesia dapat **meningkatkan profil dan reputasi ekonomi yang berimplikasi pada tumbuhnya kepercayaan dari para investor**. Kepercayaan investor utamanya dari negara-negara barat dapat tumbuh karena negara anggota OECD dipandang mampu menerapkan standar tinggi, komitmen tinggi terhadap demokrasi dan peraturan perundang-undangan, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan dan anti-korupsi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi pasar yang terbuka dan transparan, iklim yang kondusif untuk investasi dan kompetisi, serta komitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.[72]

Namun demikian, dapat diperhatikan pada kuartal II 2023, sebesar 53,3% atau Rp 186,3 triliun realisasi investasi bersumber dari penanaman modal asing. Penelitian LPEM FEB UI menunjukkan lima negara investor utama ke Indonesia, yaitu Singapura (USD 3,4 miliar), RRT (USD 2,6 miliar), Hong Kong (USD 2,0 miliar), Jepang (USD 1,0 miliar), dan Amerika Serikat (USD 0,8 miliar). Pencapaian PMA yang melampaui PMDN menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dunia usaha di Indonesia cukup baik.

5.1.6 Berpartisipasi dalam Pembentukan Standar OECD

Dalam proses aksesi, Indonesia perlu menyepakati standar OECD yang telah dibuat tanpa berpartisipasi aktif dalam pembuatan standar tersebut. **Apabila menjadi anggota OECD,**

---

[72] OECD Jakarta Office, "Penyampaian Sebagai Tindak Lanjut Kegiatan Limited Discussion: State of Play and Potential Benefits for Accession to the OECD."

Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam pembentukan norma global melalui, antara lain: (i) berpartisipasi pada diskusi kebijakan OECD serta turut dapat mengembangkan solusi yang inovatif guna mengatasi masalah bersama; (ii) berpartisipasi dalam pembentukan standar OECD di berbagai area tata kelola pemerintahan, seperti anti-korupsi, lingkungan hidup, pajak, hingga kecerdasan buatan dan nanoteknologi; dan (iii) memanfaatkan OECD untuk memperluas cakupan global. Saat ini, Indonesia hanya berposisi sebagai *strategic partner* dari OECD yang membuat peran Indonesia dalam pembentukan standar dan norma ekonomi global.

5.2 Antisipasi Tantangan dan Implikasi Proses Aksesi ke OECD

5.2.1 Kontribusi

Indonesia harus menyediakan anggaran yang cukup besar apabila bergabung OECD. Kontribusi sebagai *full member* akan dihitung berdasarkan *scale of assessment* yang berbeda dengan perhitungan di PBB. **OECD menghitung kontribusi keanggotaan berdasarkan jumlah populasi penduduk dan PDB**. Dengan komponen kontribusi tersebut, terdapat kemungkinan kontribusi Indonesia lebih besar dari sebagian negara-negara Uni Eropa.

Pada tahun 2023 jumlah anggaran OECD Bagian I (yang dibagi rata untuk semua negara anggota) mencapai EUR 219,6 juta. Sedangkan anggaran OECD Bagian II (program yang didanai negara yang berminat/*voluntary additional contribution*) mencapai EUR 338,3 juta. Sementara itu, *scale of assessment* setiap negara berbeda-beda. Misalnya AS membayar 19,1% anggaran, Prancis membayar 5,1% anggaran, dan Jepang membayar 9% anggaran. Kosta Rika yang baru diterima sebagai anggota membayar 0,9% anggaran.[73]

5.2.2 Standar dan Instrumen OECD

OECD memiliki beberapa **tolok ukur penerimaan anggota OECD berdasarkan *Framework for the Consideration of Prospective Members***. Salah satu tolok ukur utama adalah *state of readiness* (kesiapan) kepatuhan terhadap *guidelines* OECD.[74] Apabila suatu negara menunjukkan bukti kepatuhan terhadap *guidelines* OECD, maka dapat dipertimbangkan untuk masuk OECD.

Tabel 2 Persyaratan dalam *Framework for the Consideration of Prospective Members*

Kriteria	Keterangan Kriteria	Posisi/Kesiapan Indonesia
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials	• Konvensi ini bersifat *legally binding*. • Anggota konvensi ini akan masuk dalam *Working Group on Bribery* (WGB), dan harus	• Perlu dicermati bahwa konvensi ini bersifat *legally binding* dan diharapkan melakukan komitmen-komitmen dalam *subtantive provision* konvensi ini.

[73] Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris, "Brief Note: Proses Menjadi Anggota OECD."
[74] OECD, "Report of the Chair of the Working Group on the Future Size and Membership of the Organisation to Council at the Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 7-8 June 2017 and the Framework for the Consideration of Prospective Members."

in International Business Transactions	mengubah regulasi mengenai *foreign bribery*.	• Konvensi ini kemungkinan berimplikasi terhadap perubahan regulasi domestik mengenai *foreign bribery*. • Saat ini, Indonesia adalah Negara Pihak di *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC).
Codes of Liberalisation of Capital Movements	Kode ini bersifat *legally binding* dan mengatur mengenai keterbukaan suatu negara terhadap investor dari negara-negara OECD.	• Perlu dicermati bahwa Kode ini bersifat *legally binding*. • Kode ini kemungkinan berimplikasi terhadap perubahan regulasi domestik untuk mengurangi restriksi pergerakan modal dan mengatur elemen-elemen sensitif, seperti akuisisi lahan.[75] • Negara anggota OECD harus memberikan *treatment* yang berbeda bagi investor dari anggota OECD.
Recommendation on Principles of Corporate Governance	Rekomendasi ini *non-legally binding* dan mengatur mengenai tata kelola sektor swasta berdasarkan *G20/OECD Corporate Governance Principles*.	• Rekomendasi bersifat *non-legally binding*. Namun demikian, akan dilakukan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi ini di negara atau calon anggota OECD. • Semua negara anggota G20 telah mendukung *G20/OECD Corporate Governance Principles*.[76]
Recommendation on Principles for Internet Policy Making	Rekomendasi ini *non-legally binding* dan mendorong anggotanya untuk mengembangkan kebijakan terkait internet yang bebas, terbuka, saling terhubung, dan *multistakeholder*.	• Rekomendasi bersifat *non-legally binding*. Namun demikian, akan dilakukan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi ini di negara atau calon anggota OECD. • Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE yang dapat menjadi modalitas. • Secara umum Indonesia mendukung internet yang terbuka dan saling terhubung.
Inclusive Framework on BEPS Implementation	*Inclusive Framework on BEPS* berisi *BEPS Package*, instrumen yang dapat dipakai negara-negara untuk mengatur penghindaran pajak.	• Indonesia masih menunggu perkembangan pembahasan *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy under the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS*.[77] • *Two-Pillar Solution* tersebut sedang dipertimbangkan untuk diadopsi oleh Indonesia, karena Indonesia merupakan negara anggota G20.
Model Tax Convention on Income and on Capital*	Model Tax Convention mengatur tax-related barriers dalam hal perdagangan dan investasi internasional.	• Model OECD bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dengan cara menghilangkan pajak berganda internasional serta memberikan hak pemajakan lebih banyak kepada negara domisili. • Indonesia juga membentuk dan mengembangkan modelnya sendiri yang diberi nama Model Indonesia, yang merupakan penggabungan dan pengembangan dari Model OECD dan Model PBB.

Catatan: *) Model *Tax Convention on Income and on Capital* bukan syarat, namun dimasukkan mengingat isu ini cukup penting.

[75] OECD.
[76] OECD.
[77] Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, *Buku Posisi Dasar Kebijakan Luar Negeri Indonesia*, ed. Rio Budi Rahmanto (Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 2022), 427.

Secara total terdapat sekitar 250 instrumen hukum OECD dan Indonesia telah mengaksesi 12 instrumen. Arti penting masing-masing instrumen tidak sama. Selama proses aksesi, Indonesia tidak perlu untuk mengaksesi satu per satu instrumen tersebut, melainkan akan teraksesi secara otomatis ketika sudah resmi diterima menjadi anggota. Instrumen juga dapat ditinjau ulang secara berkala, sehingga Indonesia dapat memasukkan pandangan berdasarkan pengalaman di G20 maupun forum-forum lainnya.[78]

5.2.3 Kesiapan Negosiasi dengan Komite-Komite OECD

Indonesia perlu antisipasi proses implementasi standar OECD dan reformasi domestik yang diperkirakan memerlukan waktu dan memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan yang relevan.[79] Pada prinsipnya, persyaratan bergabung dengan OECD merupakan *tailor-made recommendations* khusus negara kandidat yang didasarkan dialog dengan Kementerian/Lembaga yang relevan dari negara kandidat. Oleh sebab itu, proses aksesi OECD memerlukan komitmen dan *whole-of-government approach*.

Pada proses aksesi, **Indonesia perlu bernegosiasi dan berinteraksi dengan komite-komite OECD**. Dalam setiap komite OECD terdapat perwakilan 38 negara anggota OECD. Proses ini memerlukan komitmen kementerian/lembaga untuk secara kontinu untuk melakukan negosiasi dan implementasi rekomendasi berbagai komite tersebut. Sekretariat OECD menekankan bahwa komite-komite ini secara prinsip tidak ingin menghasilkan rekomendasi yang tidak dapat diterapkan oleh negara kandidat.

***Accession roadmap* memuat *core principles* yang digunakan setiap Komite OECD** dalam melakukan proses reviu aksesi teknis pada negara kandidat. *Accession roadmap* untuk Indonesia rencananya baru akan dirilis tahun 2024 sehingga untuk tinjauan ini kita akan merujuk pada *accession roadmap* yang sudah diadopsi OECD. Secara umum negara-negara kandidat melakukan penyesuaian yang sama karena proses aksesi dimaksudkan agar kandidat dapat memenuhi standar-standar OECD.

Dari dokumen *accession roadmap* negara-negara kandidat (Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania) dapat diketahui komite atau kelompok kerja yang akan melakukan penilaian, yaitu:

a. *Investment Committee and the Working Party on Responsible Business Conduct*
b. *Working Group on Bribery in International Business Transactions*
c. *Corporate Governance Committee*
d. *Committee on Financial Markets*
e. *Insurance and Private Pensions Committee*
f. *Competition Committee*
g. *Committee on Fiscal Affairs*
h. *Environment Policy Committee*
i. *Chemicals and Biotechnology Committee*
j. *Public Governance Committee*

---

[78] OECD Secretariat, "Paparan Pada Kegiatan 'Limited Discussion: State of Play and Potential Benefits for Accession to the OECD.'"
[79] Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM), "Setting the Scene for Indonesia's Accession to the OECD."

k. *Committee of Senior Budget Officials*
l. *Regulatory Policy Committee*
m. *Regional Development Policy Committee*
n. *Committee on Statistics and Statistical Policy*
o. *Economic Development Review Committee*
p. *Education Policy Committee*
q. *Employment, Labour and Social Affairs Committee*
r. *Health Committee*
s. *Trade Committee and the Working Party on Export Credits and Credit Guarantees*
t. *Committee for Agriculture*
u. *Fisheries Committee*
v. *Committee for Scientific and Technological Policy*
w. *Committee on Digital Economy Policy*
x. *Committee on Consumer Policy*
y. *Steel Committee*[80]
z. *Council Working Party on Shipbuilding*[81]

Indonesia dapat merujuk pada *accession roadmap* Brazil yang memiliki banyak persamaan, termasuk status sebagai *key partner*. Dari *accession roadmap* Brazil, diketahui beberapa komite mensyaratkan negara kandidat untuk mengadopsi instrumen legal tertentu. Sebagai contoh:

a. *Investment Committee and the Working Party on Responsible Business Conduct* telah menggarisbawahi beberapa instrumen untuk diikuti yaitu: *(i) Code of Liberalisation of Capital Movements; (ii) Code of Liberalisation of Current Invisible Operations; (iii) National Treatment Instrument; (iv) OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises; (v) Recommendation of the Council on Guidelines for Recipient Country Investment Policies relating to National Security; (vi) OECD Guidelines for Multinational Enterprises; dan (vii) Completion of the OECD Survey of Implementation of Methodological Standards for Direct Investment*.
b. *Committee on Statistics and Statistical Policy* mengeluarkan *Recommendation of the Council on Good Statistical Practice*.

5.2.4 Tinjauan Awal mengenai Modalitas dan Tantangan Implementasi Standar OECD

Pada tinjauan awal, telah dilakukan pembahasan dengan beberapa kementerian/lembaga, *think tank*, universitas, dan pihak yang relevan.

Pertama, Kemenko Perekonomian memandang bahwa Indonesia memiliki sejumlah **modalitas untuk bergabung dengan OECD**. Indonesia dinilai telah melakukan peningkatan kepemimpinan secara internasional melalui Presidensi di G20 dan Keketuaan

[80] Komite ini hanya tercantum sebagai asesor pada *Accession Roadmap* untuk Brazil (C/MIN(2022)21/FINAL), Bulgaria (C/MIN(2022)22/FINAL), Romania (C/MIN(2022)25/FINAL).
[81] Komite ini hanya tercantum sebagai asesor pada *Accession Roadmap* untuk Brazil (C/MIN(2022)21/FINAL), Kroasia (C/MIN(2022)23/FINAL), dan Romania (C/MIN(2022)25/FINAL).

di ASEAN 2023. Hal ini juga disertai dengan peningkatan peran di kerja sama ekonomi yang strategis bagi kawasan Indo-Pasifik seperti IPEF dan RCEP. Selain itu, status Indonesia sebagai *upper-middle income* dan kondisi demokrasi yang stabil di tanah air dinilai sebagai modal yang cukup kuat.[82]

Kedua, Kementerian PPN/Bappenas memandang aksesi ke OECD sudah **sejalan dengan target RPJPN** yang salah satu visinya untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia dan mencapai kemiskinan 0% serta pengurangan ketimpangan. Bappenas juga sudah melakukan *engagement* dengan OECD dan *G20 Development Working Group* di mana OECD membantu di sektor *blended finance*.[83]

Ketiga, delegasi **kementerian/lembaga yang relevan sudah hadir pada berbagai pertemuan OECD** meskipun Indonesia masih berstatus *key partner*. Banyak kementerian/lembaga telah memiliki kemitraan dengan OECD. Namun, kesiapan kementerian/lembaga dalam implementasi standar OECD diperkirakan akan berbeda-beda.

Keempat, sesuai tinjauan awal Sekretariat OECD,[84] terdapat **kemungkinan tantangan atau *contentious issues* bagi Indonesia** untuk implementasi standar OECD dan reformasi domestik. Inventarisasi *contentious issues* adalah dasar penting untuk keberhasilan aksesi OECD bagi Indonesia, dapat membantu pengambilan keputusan yang terinformasi dan meningkatkan transparansi. Identifikasi masalah tersebut memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, mendorong akuntabilitas dalam proses aksesi, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Beberapa isu yang patut menjadi perhatian antara lain:

a. Liberalisasi perdagangan dan investasi

   Indonesia perlu menyesuaikan regulasi perdagangannya dengan standar internasional yang dianut oleh OECD. Hal ini melibatkan penyesuaian kebijakan tarif, non-tarif, serta kebijakan perdagangan lainnya agar sejalan dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh OECD. Proses ini dapat menimbulkan tekanan dalam beberapa sektor domestik yang mungkin belum siap untuk persaingan global yang lebih ketat.

   Dalam hal liberalisasi investasi, peningkatan kerangka regulasi ini harus sejalan dengan standar OECD untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan dan dapat mengakomodasi bagi investor asing. Namun, pada saat yang sama, Indonesia harus memastikan bahwa kepentingan domestik dan pembangunan ekonomi tetap terjaga.

---

[82] Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Expert Group Meeting II: Geopolitical, Geo-Economic, and Implications Aspects of Indonesia's Accession to OECD - Public Narratives," August 16, 2023.

[83] Direktorat Pendanaan Multilateral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Expert Group Meeting II: Geopolitical, Geo-Economic, and Implications Aspects of Indonesia's Accession to OECD - Public Narratives," August 16, 2023.

[84] OECD Secretariat, "Paparan Pada Kegiatan 'Limited Discussion: State of Play and Potential Benefits for Accession to the OECD.'"

b. *Anti-bribery convention*

OECD mendorong Indonesia untuk meratifikasi *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* atau *Anti-Bribery OECD Convention*. Konvensi ini sudah menjadi syarat wajib karena terdapat pula dalam *Framework* yang mengatur *State of Readiness* negara kandidat.

Sebagai catatan, 4 (empat) kandidat OECD lainnya (Argentina, Brazil, Bulgaria, dan Peru), serta Rusia dan Afrika Selatan telah mengadopsi konvensi ini. Sementara Kosta Rika, Kolombia, dan Lithuania juga mengadopsi konvensi ini selama proses aksesi.[85]

Persoalannya, Indonesia masih terkendala untuk melaksanakan aksesi pada konvensi tersebut karena belum dapat memenuhi klausul kriminalisasi terhadap perusahaan Indonesia yang melakukan penyuapan pejabat publik di luar negeri.[86]

c. Penyederhanaan regulasi

Proses penyederhanaan ini melibatkan revisi dan pengurangan jumlah serta kompleksitas regulasi yang ada agar lebih sesuai dengan standar internasional yang dianut oleh OECD. Dalam hal ini, Indonesia telah mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*omnibus law*) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan investasi dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

Namun, UU Cipta Kerja tersebut masih memiliki berbagai kekurangan sehingga dinyatakan cacat secara formil dan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) sebagai perbaikan UU Cipta Kerja tersebut. Perppu Cipta Kerja tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 pada 31 Maret 2023. Dengan begitu UU Nomor 6 Tahun 2023 tersebut menjadi payung hukum dalam mendukung investasi dengan mempermudah perizinan berusaha.

Proses penyederhanaan regulasi sering kali melibatkan berbagai sektor dan Kementerian yang memiliki tanggung jawab berbeda. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah perlu ditingkatkan. Koordinasi yang efektif diperlukan untuk menghindari tumpang tindih, konflik kebijakan, dan untuk memastikan bahwa regulasi yang disederhanakan tetap konsisten dengan tujuan pembangunan nasional. Adanya regulasi yang sederhana dan transparan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor, mendorong pertumbuhan sektor swasta, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

---

[85] OECD, "Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions," 2023, https://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm.
[86] Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris, "Brief Note: Proses Menjadi Anggota OECD."

d. Lingkungan hidup.

Aspek lingkungan hidup mencakup, antara lain, diversifikasi bahan bakar fosil, ekonomi hijau, ekonomi biru, hingga masalah polusi laut. Sekretariat OECD menilai, dalam hal ini Indonesia dan OECD dipandang telah memiliki tujuan yang sama.

Kelima, penilaian OECD tidak hanya aspek ekonomi, namun juga **aspek politik (demokrasi) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)**. Negara-negara yang saat ini proses aksesinya terhambat umumnya terkait masalah politik, seperti Romania.

Keenam, **keterlibatan aktor non-pemerintah** merupakan bagian integral dalam proses aksesi dengan OECD. Aktor non-pemerintah, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan institusi akademis, menghadirkan beragam perspektif, kebutuhan dan keahlian. Aktor non-pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan praktik dalam negeri yang selaras dengan standar OECD.

Sektor swasta, sebagai contoh, memberikan wawasan dan masukan mengenai realitas ekonomi dan dinamika pasar, memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat aspirasional namun juga praktis dan kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Organisasi masyarakat sipil bertindak sebagai pendukung transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas sosial, serta menjaga akuntabilitas pemenuhan komitmen yang dibuat oleh pemerintah. Institusi akademis menyumbangkan penelitian dan analisis yang cermat, sehingga memperkaya wacana kebijakan dengan wawasan berbasis bukti (*evidence-based analysis*).

Secara keseluruhan, aktor non-pemerintah berfungsi sebagai mekanisme *check and balances*, yang memastikan bahwa proses aksesi dengan OECD mencerminkan kepentingan dan keprihatinan berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan mereka meningkatkan legitimasi dan efektivitas proses aksesi, yang pada akhirnya mengarah pada integrasi yang lebih kuat dan inklusif ke dalam komunitas ekonomi global.

Ketujuh, proses aksesi OECD diperkirakan akan melalui **proses pembahasan yang intensif dan sering kali bersifat teknis**. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan narasi publik di dalam negeri yang mudah dimengerti masyarakat dan informasi mengenai manfaat bagi masyarakat secara umum.

Kedelapan, proses akses OECD diperkirakan akan memakan waktu beberapa tahun, sehingga perlu **diantisipasi konteks lingkungan global yang penuh dinamika**, seperti perubahan demografi dan sosial; transformasi struktural dan teknologi; ancaman bencana iklim dan tantangan pengelolaan sumber daya alam; tensi geopolitik dan unilateralisme; serta rekonfigurasi rantai nilai global juga perlu menjadi perhatian.

6 REKOMENDASI STRATEGI KEBIJAKAN DAN NARASI PUBLIK

6.1 KESIMPULAN

1. Sesuai dengan arahan Presiden RI tanggal 13 Juli 2023, Indonesia perlu bergabung menjadi anggota OECD. **Aksesi ke OECD dipandang sejalan dengan target Indonesia untuk masuk kategori negara pendapatan tinggi** pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045.
2. **Proses aksesi ke OECD memerlukan *political will* yang kontinu serta kolaborasi segenap kementerian/lembaga terkait** karena aksesi akan memerlukan waktu yang panjang. Berkaca dari negara-negara yang relatif baru bergabung dengan OECD, aksesi paling tidak membutuhkan waktu 3 hingga 7 tahun. Reviu kebijakan ini dapat menjadi *preliminary research* untuk mengukur kesiapan Indonesia menjadi anggota OECD.
3. Bermula dari program rekonstruksi Eropa Barat pasca-Perang Dunia II, **OECD kemudian berkembang menjadi lembaga yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat** melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, mendorong kesetaraan, mengoptimalkan akses dan kesempatan yang adil, serta meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota.
4. **Perluasan keanggotaan OECD dan jangkauan global OECD terus ditingkatkan**. OECD saat ini beranggotakan 38 negara, mayoritas adalah negara berpendapatan tinggi, tetapi sejumlah negara seperti Kosta Rika, Türkiye, Meksiko, dan Kolombia berstatus berpendapatan menengah atas, seperti halnya Indonesia. Namun, apabila bergabung dengan OECD, Indonesia akan menjadi negara dengan penghasilan paling kecil, dengan GNI per kapita USD 4.580,00. Sehingga masih banyak tantangan yang perlu dihadapi apabila OECD dijadikan katalis untuk meningkatkan penghasilan per kapita yang tinggi.
5. Secara umum, **proses aksesi ke OECD** dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan: (i) pra-aksesi (ekspresi minat dan evaluasi awal); (ii) aksesi (diskusi aksesi, peta jalan aksesi, implementasi reformasi, dan ratifikasi dan aksesi); serta (iii) pasca-aksesi berupa pelaporan implementasi instrumen-instrumen OECD. Kriteria negara OECD dapat merujuk pada *Framework for the Consideration of Prospective Members*. Sedangkan negara kandidat harus memenuhi implementasi *Accession Roadmap* dan dinilai oleh komite-komite OECD sebelum benar-benar diterima menjadi anggota.
6. Secara formal, **Indonesia baru mencapai tahap pra-aksesi** sehingga perlu dilakukan pendekatan kepada negara-negara OECD karena proses aksesi membutuhkan konsensus dari 38 anggota. Indonesia sudah menjadi *key partner* OECD sejak tahun 2007 dan menandatangani *Framework of Cooperation Agreement* pada tahun 2012 yang kemudian diperbarui pada tahun 2017 dan 2022.
7. **Indonesia dapat mengambil pelajaran dan praktik terbaik dari negara-negara yang relatif baru bergabung dengan OECD**: Kosta Rika (2021), Kolombia (2020), dan Lithuania (2018). Pengalaman masing-masing negara beragam, meskipun standar yang

mesti dicapai relatif seragam. Negara-negara misalnya berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak, melawan korupsi, melakukan transformasi industri, hingga reformasi BUMN. Pelajaran juga dapat diperoleh dari negara kandidat OECD seperti Argentina dan Brazil.

8. Analisis kebijakan ini dilihat dari 2 (dua) aspek: geopolitik dan geoekonomi.
   a. **Dari aspek geopolitik**, apabila bergabung dengan OECD, Indonesia tetap dapat menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang di OECD dapat menjadi kesempatan untuk menyuarakan posisi negara berkembang sekaligus memainkan peran *bridge builder* antara negara maju dan berkembang dan/atau rivalitas antar kekuatan dunia.
   b. **Dari segi geoekonomi**, terdapat hal-hal yang perlu diantisipasi sebagai implikasi dari proses aksesi ke OECD, seperti kontribusi, pemenuhan standar dan instrumen OECD, serta kesiapan nasional. Beberapa isu seperti liberalisasi perdagangan dan investasi, *anti-bribery,* penyederhanaan regulasi, hingga lingkungan hidup dapat menjadi tantangan ke depan sehingga perlu perhatian bersama.

6.2 Rekomendasi Strategi Kebijakan

6.2.1 Strategi kebijakan di luar negeri

1. **Indonesia secara sistematis melakukan pendekatan ke negara-negara OECD untuk mendapatkan dukungan politis**.

   Pemerintah RI perlu secara sistematis melakukan pendekatan pada berbagai tingkatan untuk meminta dukungan politis negara-negara anggota OECD, utamanya negara-negara yang belum menyampaikan dukungan secara terbuka. Dalam hal ini, kehadiran pejabat tinggi negara pada pertemuan Dewan OECD dan pertemuan lainnya dapat menunjukkan komitmen tinggi untuk proses aksesi.

2. **Pemerintah RI dapat melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan OECD**.

   Pada tingkat politis atau *high level* pendekatan dapat dilakukan oleh tingkat kepala negara/kepala pemerintahan atau menteri kepada Sekjen OECD. Kemudian pada tingkat duta besar dapat dilakukan pendekatan kepada Dewan OECD atau Watap negara-negara anggota OECD.

   Sedangkan pada tingkat teknis dapat dilakukan komunikasi berkelanjutan dengan unit-unit terkait seperti *Directorate for Legal Affairs* pada *OECD Secretariat* atau OECD Jakarta Office. Pendekatan kepada OECD didasarkan pada prinsip kedua pihak saling membutuhkan. Indonesia memiliki daya tawar untuk menegosiasikan standar OECD. Sementara OECD tengah berupaya meningkatkan raihan global mereka, terutama di Asia Tenggara.

3. **Indonesia dapat menggunakan proses aksesi untuk memperoleh dukungan teknis dan finansial untuk kelancaran reformasi domestik.**

   Selama proses aksesi, Pemerintah RI harus memanfaatkan segala sumber daya yang disediakan oleh OECD seperti: (i) akses kepakaran, penelitian, hingga analisis yang tidak terbuka untuk publik; (ii) praktik terbaik melalui lebih dari 300 komite dan kelompok kerja; (iii) partisipasi pada *peer review* yang berguna untuk meningkatkan kebijakan pada aspek yang lebih spesifik; (iv) akses data dan statistik terkini untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai masalah ekonomi dan sosial; dan (v) komparasi dan tolak ukur terhadap statistik OECD.

4. **Kementerian/Lembaga dapat mengintensifkan upaya lobi dan pembahasan teknis kepada pihak-pihak terkait di OECD, terutama komite dan kelompok kerja.**

   Aksesi ke OECD membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Terlebih selama tahap pra-aksesi, Pemerintah RI perlu meyakinkan negara-negara OECD akan kesiapan dan keseriusan Indonesia. Keterlibatan kementerian/Lembaga (K/L) sangat diperlukan. Sementara ini, beberapa aspek yang dipandang langsung oleh OECD akan menjadi tantangan adalah masalah liberalisasi perdagangan dan investasi, pengesahan konvensi anti-suap, penyederhanaan regulasi, dan lingkungan hidup.

   K/L yang relevan dapat melakukan pendekatan awal mengenai isu-isu tersebut. K/L terkait secara sinergi perlu mendemonstrasikan komitmen Indonesia pada *open and fair trade;* promosi inovasi, produktivitas, dan *competitiveness*; membangun sistem pendidikan nasional kuat serta investasi pada riset dan pengembangan; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan kebijakan lingkungan; energi berkelanjutan; standar kesehatan masyarakat yang layak; sistem transportasi yang efisien; sistem hukum yang transparan dan adil; hingga penciptaan iklim investasi yang kondusif.

5. **Memanfaatkan proses aksesi menjadi anggota OECD untuk meningkatkan kepercayaan investor asing**.

   Indonesia perlu mempromosikan hal-hal yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan swasta asing untuk berbisnis di Indonesia, di antaranya dengan stabilitas kebijakan politik dan makroekonomi. Keberhasilannya dapat diukur dengan peningkatan investasi asing langsung dari negara-negara OECD. Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2022, Jepang (USD 3,56 miliar) dan Amerika Serikat (USD 3,02 miliar) berada pada urutan teratas sebagai penanam modal asing di antara negara-negara OECD, tetapi masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura (USD 13,28 miliar), China (USD 8,22 miliar), dan Hongkong (USD 5,51 miliar).

6.2.2 Strategi kebijakan di dalam negeri

1. **Penyelarasan kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik.**

   Indonesia belum sepenuhnya memenuhi persyaratan *state of readiness* pada *Framework for the Consideration of Prospective Members*. Sehingga diperlukan

perubahan regulasi domestik agar dapat memenuhi instrumen OECD baik yang bersifat *legally binding* maupun *non-legally binding*.

Dalam melakukan penyelarasan, Indonesia dapat menggunakan strategi kooperatif dalam *norm-setting* di OECD. Di satu sisi, Indonesia mengikuti standar negara maju, di sisi lain tidak serta merta meninggalkan kepentingan negara berkembang. Meski OECD dapat menjadi katalis untuk mencapai Indonesia Maju, proses aksesi bukan bersifat perubahan, melainkan penyesuaian.

Instrumen-instrumen OECD perlu ditinjau agar sejalan dengan kepentingan dan kebijakan nasional, terutama sejalan dengan arah kebijakan nasional. Apabila OECD memutuskan untuk membuka proses aksesi untuk Indonesia, tahap selanjutnya tentu adalah adopsi *Accession Roadmap* untuk Indonesia. Proses perumusan peta jalan aksesi tersebut mesti diselaraskan dengan rencana Indonesia ke depan seperti RPJPN 2025-2045.

2. **Peninjauan pelaksanaan Joint Work Programme Indonesia-OECD dengan perencanaan pembangunan nasional.**

   Sebagai langkah penyelarasan awal, perlu dilakukan evaluasi atas implementasi kebijakan kerja sama Indonesia-OECD yang tengah berjalan. Kerangka kerja sama kedua pihak saat ini berdasarkan pada *Joint Work Programme* (JWP) 2022-2025, yang dirancang agar dapat membantu Indonesia mencapai RPJMN 2020-2024.

   Evaluasi terhadap JWP diharapkan dapat menghasilkan gambaran awal seberapa selaras standar-standar OECD yang sedang berupaya dipenuhi dengan arah pembangunan nasional yang ingin dicapai. Pembahasan JWP berikut dapat disesuaikan dengan proses aksesi Indonesia ke OECD dan perencanaan pembangunan nasional berikutnya (e.g. RPJMN 2025-2029, RPJPN 2025-2045).

3. **Perlunya tinjauan aspek reformasi BUMN yang selaras dengan kepentingan nasional.**

   Berkaca dari pengalaman negara-negara yang bergabung dengan OECD, reformasi BUMN akan menjadi salah satu isu utama selama proses aksesi. Kementerian BUMN sejauh ini sudah banyak mengadopsi standar OECD terkait instrumen tata kelola. Namun, beberapa masih menjadi tantangan seperti pengelolaan BUMN yang tepat vis-a-vis pengelolaan monopoli; perubahan perusahaan umum menjadi PT; dan penunjukan dewan komisaris yang independen. Meskipun begitu, dalam penyelarasan BUMN sesuai standar OECD perlu dilakukan tinjauan khusus sehingga penyesuaian yang dilakukan dapat memberi manfaat baik bagi Indonesia maupun OECD.

4. **Pelibatan pendekatan politik dalam proses aksesi.**

   Aksesi Indonesia didorong oleh motif ekonomi dan pembangunan. Akan tetapi, pendekatan ekonomi mesti didukung dengan pendekatan politik. Bentuk konkretnya misalnya dengan mengintensifkan *trade diplomacy* selama proses aksesi sehingga akan memerlukan lobi, *political engagement*, dukungan internasional, pengintensifan

perjanjian dagang, hingga pertimbangan geopolitik dan geoekonomi selama proses aksesi.

5. **Perlunya pemahaman dan komitmen bersama dengan DPR RI**

   Proses aksesi Indonesia ke OECD memerlukan komitmen politik dan dukungan seluruh aspek masyarakat utamanya DPR RI mengingat kemungkinan beberapa aspek penyelarasan terkait dengan berbagai kebijakan dan peraturan nasional. Sehingga diperlukan pemahaman dan komitmen bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk melakukan berbagai reformasi di berbagai bidang sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

6.2.3 Narasi Publik

Rencana Indonesia untuk bergabung dengan OECD melalui proses aksesi sudah sepatutnya didukung oleh berbagai pemangku kepentingan domestik. Perlu diantisipasi sejumlah tantangan akan muncul dan perlu dihadapi sebagai konsekuensi dari proses reformasi berbagai sektor tata kelola yang menjadi prasyarat dalam proses aksesi.

Kendati dihadapkan dengan berbagai tantangan, proses aksesi tidak boleh surut, melainkan sudah sepatutnya didukung secara penuh oleh berbagai kalangan, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, serta terutama oleh masyarakat, mengingat berbagai manfaat dapat dipetik apabila Indonesia menjadi anggota OECD.

Keanggotaan pada OECD bermanfaat bagi Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Konteks pembangunan kontemporer OECD yang dapat dilihat sejalan dengan diplomasi ekonomi dan transformasi industri Indonesia, juga dipandang selaras dengan rancangan RPJPN 2025-2045. Manfaat keanggotaan pada OECD dapat dilihat dari segi manfaat politik dan hukum, manfaat ekonomi dan pembangunan, dan manfaat sosial yang bersifat konkret dan pragmatis sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Manfaat Politik, Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan

1. **Meningkatkan citra positif Indonesia di dunia**. Visi Indonesia Emas 2045 berupaya untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 dan PDB terbesar ke-5 dunia pada tahun 2045. Untuk itu, diperlukan peningkatan citra dan peran Indonesia di tingkat global yang dapat mendukung tujuan tersebut. OECD yang mayoritas beranggotakan negara berpendapatan tinggi dapat menjadi organisasi yang tepat bagi Indonesia apabila ingin meningkatkan prestise di tingkat global.
2. **Diakui sebagai salah satu kekuatan ekonomi Asia**. Indonesia dapat menjadi negara Asia ke-3 yang bergabung dengan OECD setelah Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara tersebut sudah dipandang sebagai salah satu kekuatan ekonomi Asia. Kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara serta peran vital Indonesia untuk menjaga keamanan dan kestabilan kawasan Indo-Pasifik akan sejalan dengan peningkatan peran Indonesia sebagai anggota OECD. Dengan menjadi negara pertama dan satu-satunya dari ASEAN yang bergabung dengan OECD, daya tawar Indonesia di kawasan akan lebih meningkat.
3. **Penguatan peran Indonesia dalam diplomasi multilateral**. Indonesia telah berhasil memimpin forum-forum multilateral besar seperti G20 (2022) dan ASEAN (2023) serta

selalu membawa pengalaman sebagai *bridge builder* untuk menghubungkan kepentingan negara berkembang dengan negara maju. Dengan menjadi anggota OECD, tidak serta merta Indonesia akan meninggalkan kepentingan negara berkembang. Justru Indonesia dapat menyuarakan kepentingan pembangunan yang lebih sesuai dengan negara-negara berkembang.

4. **Reformasi penegakan hukum di dalam negeri**. Instrumen OECD sejalan dengan upaya Indonesia untuk menciptakan tata kelola hukum yang lebih adil. Terdapat kesesuaian antara Indonesia dan OECD untuk memerangi korupsi. Apabila bergabung dengan OECD, Indonesia harus ikut serta dalam Konvensi Anti-Suap OECD yang mengkriminalisasi pemberian suap oleh orang asing kepada pejabat publik. Instrumen ini dapat mencegah pejabat di dalam negeri menerima suap dari orang asing atau entitas bisnis asing, serta mencegah pelaku usaha Indonesia di luar negeri melakukan hal yang sama terhadap pejabat di luar negeri. Dengan begitu iklim bisnis di Indonesia akan lebih sehat dan kondusif untuk berkompetisi sehingga dapat mencegah masuknya bisnis-bisnis asing yang dapat merugikan masyarakat. Sebaliknya, pelaku usaha Indonesia yang melakukan usaha di luar negeri akan lebih terlindungi dari praktik suap sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dalam berbisnis. Instrumen ini akan melengkapi upaya pengentasan korupsi yang selama ini sudah dimiliki oleh Indonesia.
5. **Perbaikan tata kelola pemerintahan.** Menjadi anggota OECD merupakan kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik sehingga pelayanan terhadap masyarakat dari pejabat publik maupun aparatur sipil negara akan lebih baik. Melihat perkembangan dari negara-negara yang baru bergabung dengan OECD seperti Lithuania, Kolombia, dan Kosta Rika, maka Indonesia dapat menjadikan kesempatan ini untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola; mencapai kestabilan politik, menghapuskan kekerasan hingga memerangi terorisme; meningkatkan efektivitas pemerintahan; meningkatkan kualitas regulasi; meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan; hingga memerangi korupsi. Perbaikan tata kelola pemerintahan tersebut tidak hanya diberlakukan pada tingkat pusat, tetapi juga pada tingkat daerah sehingga pelayanan publik yang optimal juga dapat dirasakan ke berbagai daerah.

Manfaat Ekonomi dan Pembangunan

1. **Meningkatkan pendapatan nasional bruto per kapita**. Aksesi ke OECD akan terasa bermanfaat bagi masyarakat apabila Indonesia dapat meningkatkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita. Peningkatan GNI per kapita mendorong Indonesia untuk keluar dari *middle-income trap* atau jebakan negara-negara berkembang dengan pendapatan menengah. Dengan masuk kategori negara berpendapatan tinggi, secara umum penghasilan masyarakat Indonesia dapat dikatakan meningkat.
2. **Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan**. Meningkatnya GNI per kapita sebagai negara maju yang diharapkan oleh Indonesia disertai dengan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Pandemi COVID-19 kembali mengakibatkan peningkatan kesenjangan dan kemiskinan, tetapi dengan mengakses berbagai sumber daya OECD seperti kepakaran, riset, analisis, serta pendanaan, harapannya dapat mendukung pengambilan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

3. **Pemanfaatan bonus demografi**. Penduduk usia kerja Indonesia pada tahun 2021 mencapai 67,74% dari total penduduk, atau lebih unggul dibandingkan persentase penduduk usia kerja dunia (64,89%). Indonesia saat ini berada dalam kondisi bonus demografi yang harus dimaksimalkan dan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Setelah itu tren usia kerja Indonesia diperkirakan akan menurun, tetapi masih akan berada pada peringkat ke-5 secara jumlah pada tahun 2050.[87] Keanggotaan pada OECD dapat memaksimalkan potensi bonus demografi ini karena terbuka lebar kesempatan untuk melakukan peningkatan *human capital* yang ditopang oleh perbaikan pada sektor pendidikan dan transformasi sektor industri.
4. **Pengurangan utang pemerintah**. Reformasi pada proses aksesi OECD mendorong negara kandidat untuk terus melakukan perbaikan dalam bentuk optimalisasi pajak untuk pendapatan pemerintah sehingga persentase utang pemerintah terhadap total PDB dapat berkurang.
5. **Tata kelola BUMN untuk memaksimalkan manfaat untuk masyarakat.** Salah satu reformasi paling signifikan yang dituntut OECD adalah perbaikan pada sektor BUMN. Reformasi OECD mendorong pemisahan campur tangan politik pada BUMN. Momentum ini dapat dimanfaatkan Indonesia sehingga BUMN di satu sisi dapat mendistribusikan manfaat dan sumber daya kepada masyarakat, dan di sisi lain sebagai perusahaan tetap profesional untuk memperoleh keuntungan. Program nasional untuk mencapai bahan bakar satu harga dapat disinergikan dengan reformasi BUMN sesuai standar OECD.

Manfaat Sosial

1. **Peningkatan kualitas pendidikan.** OECD secara rutin mengeluarkan penilaian *Programme for International Student Assessment* (PISA). Skor PISA yang diperoleh Indonesia pada tahun 2018 masih jauh di bawah rata-rata skor OECD, yaitu 379 (peringkat 72/79) untuk kemampuan matematika, 396 (71/79 untuk sains), dan 371 (73/78) untuk kemampuan membaca. Menjadi anggota OECD dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menyusun kebijakan pendidikan yang dapat meningkatkan daya saing pelajar Indonesia di tingkat dunia.
2. **Peningkatan kualitas kesehatan**. Salah satu komite yang akan melakukan penilaian implementasi *Accession Roadmap* pada negara kandidat OECD adalah *Health Committee*. Penilaian ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan nasional terutama dalam meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan.

[87] Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, "Masa Depan Penduduk Usia Kerja Di Dunia," June 10, 2023.

7 DAFTAR PUSTAKA

America, International Trade Administration United States of. "Costa Rica - Country Commercial Guide," March 30, 2023. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/costa-rica-market-challenges#:~:text=Costa Rica is facing fiscal,rail%2C roads%2C and bridges.

Americas Quarterly. "OECD: Still a Long Road Ahead for Argentina, Brazil and Peru," 2022. https://www.americasquarterly.org/article/oecd-still-a-long-road-ahead-for-argentina-brazil-and-peru/#:~:text=Argentina's application to join the,removal of all capital controls.

Arshad, Yusri, Abdul Rahman Ahlan, and Sharifah Norhafiza Syed Ibrahim. "Combining Grounded Theory and Case Study Methods in IT Outsourcing Study." *Journal of Information System Research and Innovation*, 2013, 84–93.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Expert Group Meeting II: Geopolitical, Geo-Economic, and Implications Aspects of Indonesia's Accession to OECD - Public Narratives," August 16, 2023.

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri. *Buku Posisi Dasar Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. Edited by Rio Budi Rahmanto. Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 2022.

Base Firma. "Brazil's Challenge to Becoming a Member of the OECD," June 14, 2019. https://www.internationaltaxreview.com/article/2a69yvx1bb2vzxyrngnwg/brazils-challenge-to-becoming-a-member-of-the-oecd.

Bonucci, Nicola, Jonathan E. Kellner, Filipe Lima, and Thomas B. Ayres. "Brazil's Accession to the OECD – This Is Where the Serious Things Begin." *Paul Hastings*, September 12, 2022. https://www.paulhastings.com/en-GB/insights/client-alerts/brazils-accession-to-the-oecd-this-is-where-the-serious-things-begin.

Borbasi, Sally, Debra Jackson, and Rae Langford. *Navigating the Maze of Nursing Research: An Interactive Learning Adventure*. Marrickville: Elsevier Australia, 2004.

Center for Strategic and International Studies. "Trade Outcomes from the Trump-Bolsonaro Meeting: More than Meets the Eye?," March 20, 2019. https://www.csis.org/analysis/trade-outcomes-trump-bolsonaro-meeting-more-meets-eye.

Centre for Strategic and International Studies. "Indonesia Accession to OECD: Seeking Convergence," August 15, 2023.

Conectas. "OECD Report Shows Environmental Challenges for Brazil to Join the Organization," December 16, 2021. https://www.conectas.org/en/noticias/oecd-report-shows-environmental-challenges-for-brazil-to-join-the-organization/.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2014.

Danish, Sara, and Norberto Martinez. "Colombia Joins the OECD—so What?" *Global Americans*, June 18, 2020. https://theglobalamericans.org/2020/06/colombia-joins-

the-oecd-so-what/.

Direktorat Pendanaan Multilateral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Expert Group Meeting II: Geopolitical, Geo-Economic, and Implications Aspects of Indonesia's Accession to OECD - Public Narratives," August 16, 2023.

Eldia. "Con Una Carta, El Gobierno Le Puso Reparos a La OCDE," April 17, 2022. https://www.eldia.com/nota/2022-4-17-13-4-0-con-una-carta-el-gobierno-le-puso-reparos-a-la-ocde-tras-invitacion-para-ingresar-al-selecto-organismo-politica-y-economia.

EY. "Brazil Transfer Pricing Law Enforceable Beginning 1 January 2024," 2023. https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/brazil-transfer-pricing-law-enforceable-beginning-1-january-2024.

G20. *G20 New Delhi Leaders' Declaration, New Delhi, India, 9-10 September 2023*. New Delhi: G20, 2023.

Gehring, Hubert, and Maria Christina Koch. "On the Path from Failed State to OECD Member?: Colombia's Way towards a Brighter Future." In *The Globalisation of Terrorism*, edited by Gerhard Wahlers, 95–110. Konrad Adenauer Stiftung, 2016.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Bogota. "Bahan Masukan Awal Terkait Proses Aksesi Kolombia Ke OECD," October 10, 2023.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Buenos Aires. "Penyampaian Masukan Untuk Reviu Kebijakan Aksesi Indonesia Ke OECD," October 2, 2023.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen. "Bahan Masukan Dari Kementerian Luar Negeri Lithuania," October 3, 2023.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris. "Brief Note: Proses Menjadi Anggota OECD," June 15, 2023.

———. "Hasil Pertemuan OECD Council Tentang Rencana Aksesi Indonesia Di OECD, 13 September 2023," September 14, 2023.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Ringkasan Eksekutif Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, Dan Makmur*. Jakarta, 2019.

Matera, Michael, Pablo Souto, and Silvina Vatnick. "A Preliminary Assessment of Argentina's Accession to the OECD: A Report of the CSIS Americas Program." *CSIS*, April 2019.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania. "OECD," 2023. https://urm.lt/default/en/economic-diplomacy/lithuania-and-the-international-economic-organizations/oecd.

OECD. "Accession to the Organisation." Accessed October 11, 2023. https://www.oecd.org/legal/accession-process.htm.

———. "Colombia's Path Towards OECD Accession." Accessed August 21, 2023. https://www.oecd.org/colombia/colombia-accession-to-the-oecd.htm.

———. "Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions," 2023. https://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm.

———. "Costa Rica: Strengthening Public Finances, Productivity and Education Is Key to Continued Progress, Says OECD," February 6, 2023. https://www.oecd.org/newsroom/costa-rica-strengthening-public-finances-productivity-and-education-is-key-to-continued-progress.htm.

———. *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*. Paris: OECD, 2023.

———. "Letter to H.E. Mr. Alberto Fernandez," 2022. https://www.oecd.org/newsroom/Letter-to-H-E-Mr-Alberto-Fernandez-President-Argentina.pdf.

———. "OECD Economic Surveys: Argentina 2019," 2019. https://www-oecd--ilibrary-org.translate.goog/sites/63518aa6-en/index.html?itemId=%2Fcontent%2Fcomponent%2F63518aa6-en&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

———. *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2010*. Paris: OECD, 2010.

———. *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020*. Paris: OECD, 2020. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b56512da-en/1/3/2/index.html?itemId=/content/publication/b56512da-en&_csp_=3566eda5c71b885d65a0049c7e7c9b6d&itemIGO=oecd&itemContentType=book.

———. *OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Costa Rica*. Paris: OECD, 2017.

———. "OECD Welcomes Costa Rica as Its 38th Member," May 25, 2021. https://www.oecd.org/costarica/oecd-welcomes-costa-rica-as-its-38th-member.htm.

———. "Report of the Chair of the Working Group on the Future Size and Membership of the Organisation to Council at the Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 7-8 June 2017 and the Framework for the Consideration of Prospective Members." Paris, 2017.

———. "The OECD Accession Process," July 2023.

———. "The OECD and Brazil: A Mutually Beneficial Relationship." Accessed October 17, 2023. https://www.oecd.org/latin-america/countries/brazil/#:~:text=Following Brazil's adherence to the,the terms%2C conditions and process.

———. "The OECD and Costa Rica: A Mutually Beneficial Relationship." Accessed August 22, 2023. https://www.oecd.org/latin-america/countries/costa-rica/.

OECD Jakarta Office. "Penyampaian Sebagai Tindak Lanjut Kegiatan Limited Discussion: State of Play and Potential Benefits for Accession to the OECD," August 18, 2023.

OECD Secretariat. "Paparan Pada Kegiatan 'Limited Discussion: State of Play and Potential Benefits for Accession to the OECD,'" August 21, 2023.

Perwakilan Tetap RI Jenewa. "Penyampaian Pada Focus Group Discussion: Lesson Learned and Best Practices with OECD Members and Candidates," August 2023.

Perwakilan Tetap RI New York. "Penyampaian Pada Focus Group Discussion: Lesson Learned and Best Practices with OECD Members and Candidates," August 2023.

Polit, Denise F., and Cheryl Tatano Beck. *Nursing Research: Principles and Methods*. 7th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 2003.

Pusat Strategi Kebijakan Multilateral. "Masa Depan Penduduk Usia Kerja Di Dunia," June

10, 2023.

Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM). "Setting the Scene for Indonesia's Accession to the OECD," August 8, 2023.

Sekretariat Kabinet. "OECD Apresiasi Kepemimpinan Presiden Jokowi Lakukan Langkah Reformasi Di Indonesia," 2023. https://setkab.go.id/oecd-apresiasi-kepemimpinan-presiden-jokowi-lakukan-langkah-reformasi-di-indonesia/.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I: Proses Aksesi Keanggotaan Indonesia Pada OECD," July 27, 2023.

Stevens, Philip. "Is the OECD Ready for Colombian Membership?" *Geneva Network*, April 17, 2018. https://geneva-network.com/research/colombia-oecd-accession/.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.